

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM PENANGGULANGAN
DAN REKONSTRUKSI DAMPAK KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

**DICKY DHARMAWAN
NPM : 147110112**

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2019

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Dicky Dharmawan
NPM : 147110112
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanggulangan dan Rekonstruksi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 14 Maret 2019

Pembimbing I



Hendry Andry, S.Sos., M.Si

Pembimbing II

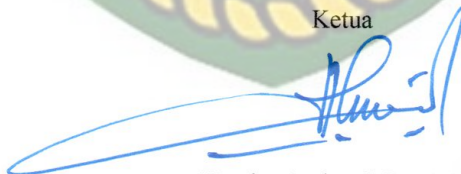


Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Ketua



Hendry Andry, S.Sos, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Dicky Dharmawan
NPM : 147110112
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanggulangan dan Rekonstruksi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti"

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konfrehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 14 Maret 2019

Ketua,



Nurmasari, S.Sos., M.Si

Sekretaris,



Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si


Anggota,



Hendry Andry, S.Sos, M.Si

Mengetahui,

Wakil Dekan 1



H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 192 /UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 13 Maret 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 14 Maret 2019 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Dicky Dhermawan
NPM : 147110112
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan dan Rekonstruksi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Nilai Ujian : Angka : " 81,43 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nurmasari, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Dia Merina Suri, S.Sos., M.Si..	Sekretaris	2. 
3.	Hendry Andry, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	M. Faisal Amrillah, S.Sos., M.Si	Anggota	4. 
5.	Eka Komalasari, S.Sos., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Andri Kurniawan, B.PM., M.Si	Notulen	6. 

Pekanbaru, 14 Maret 2019
An. Dekan,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.
Wakil Dekan / Bid Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 192/UJR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UJR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UJR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Dicky Dhermawan
N P M	: 147110112
Program Studi	: Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penganggulangan Dan Rekonstruksi Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.Nurmasari.,S.Sos.,M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2.Dia Meiruna Suri.,S.Sos.,M.si	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3.Hendry Andry.,S.Sos.,M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4.M. Faisal Amrillah.,S.Sos.,M.si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
5.Eka Komalasari.,S.Sos.,M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
6.Andri Kurniawan.,B.PM.,M.Si	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 13 Maret 2019
An. Dekan,

DR. H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Dicky Dharmawan
NPM : 147110112
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanggulangan dan Rekonstruksi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti


Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 14 Maret 2019

Ketua,

Sekretaris,


Nurmasari, S.Sos., M.Si.


Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si


Turut Mengetahui,

Program Studi Administrasi Publik

Wakil Dekan I

Ketua Program Studi


H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.


Hendry Andry, S.Sos., M.Si.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat merampungkan penyelesaian skripsi ini yang berjudul. “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan dan Rekonstruksi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti”. Shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suritauladan dan pengajaran sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman. Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau, dimana penulis menekuni ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan penulisan tentang ilmu-ilmu sosial dan ilmu politik.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Moris Adidi Yogya, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Hendry Andry, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
4. Ibu Nurmasari, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik, yang juga turut memberikan motivasi serta membimbing penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Hendry Andry, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu dan membagikan ilmunya sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah- mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
8. Kepala Tata Usaha beserta seluruh Staf, Karyawan/Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan segala urusan administrasi mengenai keperluan penulis yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi ini.
9. Pegawai BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti dan Damkar Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah membantu dalam memberikan data dan

informasi yang di perlukan oleh peneliti dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

10. Ayahanda Dharmendra dan Ibunda Desviani serta yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, dan adik saya Dede Oktaviardi, Dhea Mutiara, Dio Muhammad Hakim yang selalu memberikan semangat dan motivasi penulis untuk bisa menyelesaikan Skripsi ini.
11. Kepada Wulan Puspita Anggraini yang telah memberikan semangat, doa serta motivasi kepada penulis agar tetap terus semangat dalam melakukan penulisan. Serta tanpa lelah tetap terus menemani penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini hingga selesai.
12. Kepada orang-orang yang saya sayangi, teman-teman Administrasi Publik angkatan 2014 yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya.
13. Kepada sahabat-sahabat saya Ahmad Abrar S.Ap, Josua Butar-Butar S.Ap, Ardy Suhandi S.Ap, Ambisi Abdi Negara, Mahmud Saleh, Ari Andrean dan Samsi Nurzaman yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
14. Kepada keluarga besar HIMIA PUBLIK FISIPOL UIR beserta teman-teman terdekat yang telah memberikan semangat dan arahan kepada penulis selama menyelesaikan Skripsi ini.

Dalam menyusun naskah skripsi ini penulis masih menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang

bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini untuk kesempurnaan skripsi penulis.

Akhir kata hanya ucapan terima kasih yang bisa diberikan oleh penulis. Semoga Allah SWT membalas jasa-jasa pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Pekanbaru, 14 Maret 2019
Penulis,

Dicky Dharmawan

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFREHENSI.....	iv
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
SURAT PERNYATAAN.....	xvii
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	20
1. Tujuan penelitian.....	21
2. Kegunaan penelitian.....	21
BAB II: STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	22
A. Studi Kepustakaan.....	22

1. Konsep Administrasi.....	23
2. Konsep Organisasi	26
3. Konsep Manajemen.....	28
4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia.....	29
5. Konsep Peran	30
B. Kerangka Pikir	32
C. Hipotesis.....	33
D. Konsep Operasional.....	34
E. Operasionalisasi Variabel.....	38
BAB III: METODE PENELITIAN.....	39
A. Tipe Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Jenis dan Sumber Data.....	40
D. Informan dan Key Informan.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	45
A. Sejarah Ringkas	45
B. Struktur Organisasi	55
C. Fungsi Dan Tugas Organisasi.....	56
BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Identitas Responden.....	58
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan dan Rekonstruksi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	59

C. Faktor Penghambat Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan dan Rekonstruksi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Kepulauan Meranti..... 81

BAB VI: PENUTUP..... 83

A. KESIMPULAN 83

B. SARAN 86

DAFTAR KEPUSTAKAAN 88



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.2	Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Tahun 2016 di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	15
I.3	Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Tahun 2017 di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	17
II.1	Operasional Variabel Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan dan Rekontruksi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti	38
III.1	Populasi Dan Sampel Penelitian Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan dan Rekontruksi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti	42
V.1	Identitas informan dan key informan	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	13
II.1 Kerangka Pikir Penelitian Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan dan Rekontruksi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti	33



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1: Daftar Pedoman Wawancara penelitian Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan dan Rekontruksi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti	91
2: Photo Dokumentasi Penelitian Tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan dan Rekontruksi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti	118
3: SK Dekan Fisipol UIR No:684/UIR-Fs/Kpts/2018 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi an. Dicky Dharmawan	124
4: Surat Keterangan Tertanggal Desember 2018 dari UPT Pendapatan Pekanbaru Kota Dinas Pendapatan Provinsi Riau, Tentang Pelaksanaan Riset dan Pengumpulan Data an. Dicky Dharmawan	125
5: Surat Keterangan Penelitian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	126

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dicky Dharmawan
NPM : 147110112
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Usulan Penelitian : Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan dan Rekonstruksi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dengan kaidah- kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 17 Januari 2019
Pelaku Pernyataan

Dicky Dharmawan

**Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten
Kepulauan Meranti Dalam Penanggulangan dan Rekonstruksi Dampak
Kebakaran Hutan Dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti**

ABSTRAK

Dicky Dharmawan

Kata Kunci: Peran, Stabilisator, Inovasi, Modernisator, Pelopor dan Pelaksana Sendiri.

Kebakaran hutan dan lahar tertinggi di Provinsi Riau adalah Kabupaten Kepulauan Meranti. Salah satu yang menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai daerah dengan kebakaran hutan dan lahan terbesar di Provinsi Riau dikarenakan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten dengan daratan yang mayoritas adalah lahan gambut. Terkhusus Kabupaten Kepulauan Meranti, terdapat daerah yang menerima dampak kebakaran hutan dan lahan terluas yaitu di Kecamatan Rangsang, Rangsang Pesisir dan Merbau. Dari data pada tahun 2008 Kabupaten Kepulauan Meranti Menjadi kabupaten dengan angka kebakaran hutan dan lahan yang terluas di Provinsi Riau. Konsep teori yang penulis gunakan adalah Peran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penanggulangan dan rekonstruksi dampak kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti diukur dengan lima indikator yaitu: stabilisator, inovasi, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri. Tipe penelitian ini adalah survey deskriptif dengan metode penelitian kualitatif, yaitu mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan cara mengumpulkan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, dan membuat kesimpulan, berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa peran BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penanggulangan dan rekonstruksi dampak kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti kurang berperan dalam penerapannya, harus dioptimalkan lagi peran yang dilakukan BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti untuk penerapan agar dalam penanggulangan dan rekonstruksi bisa berperan dengan baik.

*The Role of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of the Meranti
Island Regency in Overcoming and Reconstruction of the Impact of Forest and
Land Fires in Meranti Island Regency*

ABSTRACT

Dicky Dharmawan

Keywords: Role, Stabilizers, Innovations, Modernists, Pioneer and Implementers.

The highest forest and lahar fires in Riau Province are Meranti Island District. One of the things that makes Meranti island as the area with the largest forest and land fires in Riau Province is because Meranti Island is a regency with a land that is predominantly peatland. Especially the Meranti island district, there are areas that receive the widest impact of forest fires and land, namely in the Districts of Rangsang, Coastal Stimulation and Merbau. From the data in 2008 the Meranti island district became the district with the largest number of forest and land fires in Riau Province. The theory concept that I use is Role. This study aims to determine the extent of the role of BPBD in Meranti Island Regency in overcoming and reconstructing the impact of forest and land fires in Meranti Island Regency measured by five indicators, namely: stabilizers, innovators, modernists, pioneers and implementers themselves. This type of research is a descriptive survey with qualitative research methods, namely collecting data by means of interviews, observation, and documentation. By collecting data into categories, describing it into units, synthesizing, and making conclusions, based on this analysis technique researchers assess and concluded that the role of the BPBD of Meranti Island Regency in overcoming and reconstructing the impact of forest and land fires in Meranti Island District had little role in its implementation.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi merupakan salah satu cabang ilmu sosial, definisinya tidak terbatas hanya sekedar pekerjaan yang berkenaan dengan ketatausahaan dari suatu organisasi. Administrasi dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktifitas kerjasama sejumlah manusia di dalam organisasi untuk mencapai suatu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Menurut Zulkifli (2009:9) Konsep administrasi diartikan sebagai proses kegiatan yang menghasilkan sejumlah keterangan tertulis yang dibutuhkan oleh satu atau sekelompok orang tertentu.

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan hidup bersama untuk memenuhi segala kebutuhannya. Agar kebutuhan manusia maupun kelompoknya terpenuhi maka perlu membentuk suatu organisasi.

Organisasi menurut Siagian (dalam Zulkifli, 2009:78) organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seseorang/ beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/ sekelompok orang yang disebut bawahan.

Berbicara administrasi dan organisasi tentunya tidak terlepas dari manajemen, karena manajemen merupakan faktor penting yang harus ada dalam pelaksanaan administrasi karena apabila dalam pelaksanaan administrasi namun tidak menerapkan manajemen maka pelaksanaan administrasi tersebut bisa dipastikan tidak akan bisa berjalan dengan baik.

Tergambar pada rumusan manajemen yang di kemukakan oleh George R Terry (dalam Zulkifli, 2009 : 18) mendefinisikan konsep manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan *planing, organizing, actuating, controlling* dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.

Baik buruknya organisasi tergantung dari peran organisasi tersebut begitupula dengan yang dilakukan BPBD kabupaten kepulauan meranti dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, apakah peran dari pada BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti sudah terlaksana dengan baik atau belum terlaksana dengan baik. Berikut merupakan konsep peran Menurut Siagian, (2000; 142-150) Pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Baik sebagai stabilitator, inovator, Pelopor dan pelaksana dalam kegiatan pembangunan tertentu.

Posisi Indonesia sebagai negara yang rawan dengan bencana. Oleh karena itu membuat bencana bisa saja sewaktu-waktu datang oleh karena itu perlu kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana ini. Selama ini kebijakan pemerintah dan kepedulian masyarakat Indonesia tentang manajemen bencana pada tahap pra/sebelum terjadinya bencana sangatlah kurang. Pengalaman bencana yang terjadi di Indonesia selama ini selalu menimbulkan kerugian, baik materi maupun korban jiwa dalam angka yang besar. Kejadian tersebut menunjukkan kurangnya pengetahuan dan mengaplikasika kedalam kegiatan keseharian tentang kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi benana.

Guna mengatasi berbagai hal tersebut maka pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dimana BNPB ini akan menjadi

kepanjangan tangan pemerintah dalam hal penanganan bencana. BNPB ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2008. Pembentukan BNPB merupakan realisasi Pasal 10 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Pada Pasal 10 ayat (2) dari Undang-undang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa lembaga ini merupakan lembaga pemerintah nondepartemen sebagai menteri. Bencana ditinjau dari sini terjadi bukan di daerah tertentu saja bahkan hampir di setiap daerah mengalami bencana untuk itu maka Undang-undang nomor 24 tahun 2007 Pasal 8 di dalam mengamatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditingkat Provinsi, Kabupaten/kotamadya. Pembentukan BPBD didasarkan pada regulasi daerah, pemerintah pusat menyerahkan pembentukan BPBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BNPB, hingga saat ini sebagian besar provinsi rawan bencana di Indonesia secara hukum telah diwajibkan mendirikan BPBD. Pemerintah kabupaten dan kota dapat memutuskan perlunya pendirian BPBD di daerahnya.

BNPB dan BPBD dirancang untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh yang merupakan perubahan dari pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru. Dimana perspektif ini memberi penekanan merata pada semua aspek penanggulangan bencana dan berfokus pada pengurangan resiko. Bisa dikatakan pembentukan BPBD sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah dan sesuai dengan hal tersebut maka pemerintah daerah harus mengeluarkan peraturan daerah mengenai penanggulangan Bencana.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, BPBD memiliki tugas pokok sebagai berikut:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana.
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
6. Mengendalikan pengumpulan uang dan barang.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
8. Menyiapkan tenaga penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat.
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan

kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

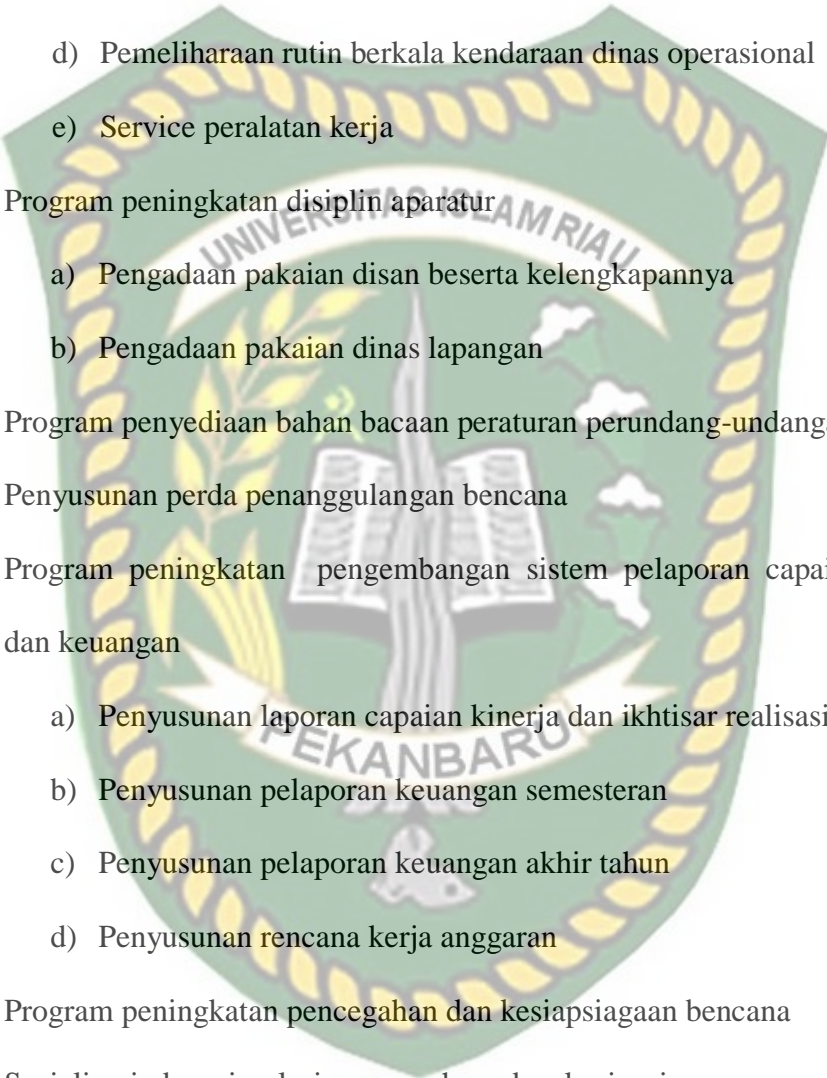
Kemudian adapun fungsi BPBD sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
3. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Berdasarkan tugas dan fungsinya BPBD di atas pada point Pertama tertuliskan beberapa fungsi BPBD sebagai bentuk pencegahan serta kesiap siagaan dalam penanggulangan bencana serta rekontruksi, oleh karena itu fokus penelitian ini hanya pada point pertama.

Adapun program kerja yang telah ditetapkan oleh BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu:

1. Program pelayanan Administrasi perkantoran
 - a) Penyediaan kebutuhan administrasi umum
 - b) Penyediaan kebutuhan administrasi perkantoran
 - c) Penyediaan kebutuhan administrasi barang dan jasa
 - d) Penataan kearsipan
 - e) Penunjang pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- 
- a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b) Pengadaan peralatan gedung kantor
 - c) Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
 - d) Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional
 - e) Service peralatan kerja
3. Program peningkatan disiplin aparatur
 - a) Pengadaan pakaian disan beserta kelengkapannya
 - b) Pengadaan pakaian dinas lapangan
 4. Program penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan
Penyusunan perda penanggulangan bencana
 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
 - b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 - c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - d) Penyusunan rencana kerja anggaran
 6. Program peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
Sosialisasi dan simulasi pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana
 7. Program pelayanan dan rehabilitasi masalah-masalah sosial
 - a) Pelatihan relawan penanggulangan bencana
 - b) Peringatan bulan bakti pengurangan resiko bencana
 - c) Penyusunan rencana kontigensi

8. Program penanganan kedaruratan bencana
 - a) Operasional penanganan darurat akibat bencana
 - b) Rapat koordinasi peringatan kedaruratan bencana
 - c) Koordinasi pemulihan awal akibat bencana
 - d) Pelatihan tim reaksi cepat
9. Program penyediaan bantuan darurat bencana
 - a) Penyediaan stock logistic
 - b) Penyediaan stock peralatan PB
10. Program pemulihan daerah bencana
 - a) Identifikasi dan verifikasi kerusakan dan kegiatan akibat bencana
 - b) Sosialisasi penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana
 - c) Bantuan perbaikan rumah akibat banjir dan longsor
 - d) Pembuatan penahan tebing

Penanggulangan bencana alam dalam PERDA Riau NO.17 tahun 2013 merupakan Penanggulangan Bencana Alam adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, meliputi prabencana, tanggap darurat, pemulihan dini dan pasca bencana.

Adapun tujuan Penanggulangan Bencana Alamyaitu:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dan;
- c. menghargai budaya lokal;

- d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
- f. meminimalisasi dampak bencana;
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- h. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Adapun bidang rehabilitasi dan rekontruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana berdasarkan PERBUP Kepulauan Meranti Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti BAB VI paragraf 5 pasal 17 yaitu:

1. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kegiatan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;

- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari:
- a. Seksi Rehabilitasi;
 - b. Seksi Rekonstruksi.

Berdasarkan paragraf 3 tentang rekonstruksi pasal 54 dalam rangka mempercepat pembangunan kembali prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah bertanggungjawab menetapkan prioritas dan melaksanakan kegiatan rekonstruksi, terdiri dari:

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. partisipasi dan peranserta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Berikut Standard Operating Procedures (SOP) Pencegahan dan Penanggulangan Serta Penyelamatan diri:

1. Pencegahan

Langkah – langkah yang perlu di antisipasi guna mencegah terjadinya bencana kebakaran sebagai berikut:

- a. Pastikan bahwa instalasi listrik aman
- b. Hindari pembebanan yang berlebihan pada satu stop kontak akan menyebabkan kabel panas dan akan bisa memicu kebakaran, ini biasanya dilakukan dengan penumpukan beberapa stop kontak atau sambungan “T” pada satu titik sumber listrik
- c. Penggunaan pemutus arus listrik (kontak tusuk) dalam keadaan baik.
- d. Apabila ada kabel listrik yang terkelupas atau terbuka, harus diperbaiki, karena bisa menyebabkan hubungan arus pendek.
- e. Jangan sekali-kali mencantol listrik, karena anda tidak memiliki sistim pengaman yang sesuai, PLN biasanya sudah memperhitungkan distribusi beba listrik, apabila ada beban berlebihan akan mengganggu jaringan listrik yang ada.

2. Penanggulangan

- a. Sediakan alat pemadam kebakaran di kantor. Apabila anda bisa membelinya, siapkanlah selimut pemadam (fire blanket) disetiap ruangan kantor.
- b. Sebagai pengganti *fire blanket*, sediakan karung goni (karung beras yang terbuat dari serat manila hennep). Basahi karung goni sebelum dipakai untuk memadamkan api.

- c. Panggil pemadam kebakaran apabila masih sempat. Pasang nomor penting dekat telephone, atau program telephone untuk nomor-nomor penting. Ingat mereka tidak akan datang dalam waktu singkat, kemungkinan api telah berkobar lebih besar.

3. Penyelamatan diri

Apabila karyawan/karyawati kantor sudah melakukan pengenalan dan pengecekan kantor dengan seksama maka :

- a. Buat rencana penyelamatan diri bersama dengan menentukan sedikitnya dua jalur
- b. Keluar dari setiap ruangan. Ini bisa melalui pintu ataupun jendela, jadi perhatikan apakah teralis kantor akan mengganggu rencana ini. Buatlah denah penyelamatan diri di kantor bersama karyawan.
- c. Persiapkan lampu senter di dekat tempat tidur bagi petugas satpam.
- d. Saat kebakaran, sebenarnya asap yang membuat orang menjadi panik dan tidak dapat bernafas dengan leluasa. Merangkaklah atau menunduk di bawah, tutup mulut dan hidung dengan kain yang dibasahi.
- e. Keluarlah dari pintu atau jendela yang terdekat menuju ketempat yang aman. Pastikan bahwa pintu dapat dengan cepat dibuka pada kondisi darurat, demikian pula jika harus melalui jendela
- f. Apabila terjebak api, pastikan balut tubuh dengan selimut tebal yang dibasahi. Ini hanya dilakukan sebagai pilihan terakhir apabila tidak ada jalan keluar menerobos kobaran api.

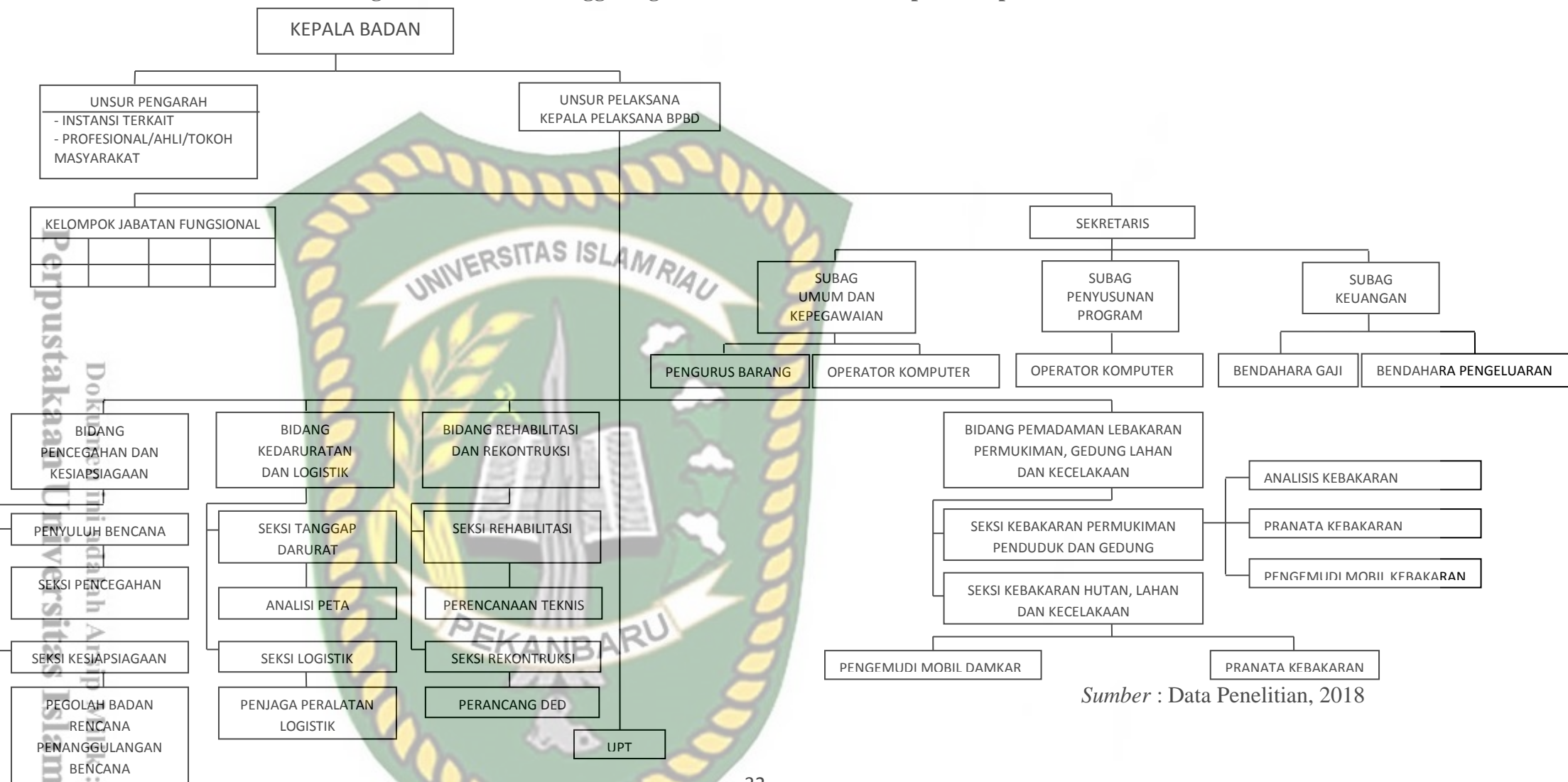
Adapun struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti No.52 th 2016 tentang kedudukan, struktur organisasi, serta tata kerja badan penanggulangan bencana daerah kabupater kepulauan Meranti dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel I.1 : Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti



Sumber : Data Penelitian, 2018

Dan berikut ini beberapa kasus yg penulis amati terkait pembakaran lahan di beberapa kabupaten di provinsi riau yg di peroleh dari MERDEKA.COM, Kebakaran lahan dan hutan kembali melanda Riau. Selama 3 hari, kebakaran lahan mencapai 150 hektare. Ini menyebabkan total luas lahan terbakar mencapai 2.152,91 hektare hingga Juli 2018. Hal itu ditemukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru, hingga Rabu tercatat 80 titik panas kebakaran hutan dan lahan terjadi di Riau. Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Riau, Jim Gafur mengatakan dalam beberapa hari terakhir terjadi Karhutla di sejumlah lokasi seperti Kabupaten Bengkalis, Meranti, Kota Dumai, Rokan Hilir hingga Pelalawan. Menurut Gafur, dari 2.152,91 hektare luas lahan terbakar itu, sebagian besar terjadi di wilayah pesisir Riau. "Total enam kabupaten kota yang mengalami kebakaran hebat dengan luasan di atas 100 hektare. Paling luas terjadi di Kepulauan Meranti (lahan gambut) seluas 928 hektare," ujar Gafur, Kamis (19/7/2018).

Dalam menakukan penanggulangan bencana BPBD kabupaten kepulauan meranti melalui Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Permukiman, Gedung, Hutan, Lahan dan Kecelakaan Kabupaten kepulauan meranti dalam melaksanakan tugas. Adapun dalam melaksanakan tugas terhadap penanggulangan bencana daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti bergerak langsung dibawah pimpinan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan juga beberapa bidang seperti bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan logistik serta bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan ini di harapkan BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti tetap konsisten dan Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti secara umumnya.

Adapun data rekapitulasi kejadian kebakaran tahun 2016 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.2 : Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Tahun 2016 di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Kec	Freq	BULAN												Jenis kebakaran		Luas M2		Kerugian
			jan	feb	Mar	apr	mei	Jun	jul	Ags	Sep	okt	nov	Des	Bangunan	Lahan	Bangunan	Lahan	
1	Tebing tinggi	41	2	6	3	18	2	-	4	2	4	3	-	2	9	37	±2340M ²	±27Ha	± 5,8 M
2	Tebing tinggi timur	4	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	1	3	-	±100Ha	± 225 Jt
3	Tebing tinggi barat	10	-	-	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	±77Ha	± 171 Jt
4	Rangsang	17	6	1	8	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	17	-	±225Ha	± 560 Jt
5	Rangsang barat	5	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	±99Ha	± 276 Jt
6	Rangsang pesisir	6	-	1	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	6	-	±180Ha	± 504 Jt
7	Tasik putri puyu	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	±3Ha	± 840 Jt
8	Merbau	8	-	-	5	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3	5	± 820M ²	±570Ha	± 2,2 M
9	Pulau merbau	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	± 640M ²	±70Ha	± 260 Jt
JUMLAH		94	8	10	27	26	3	2	4	7	5	4	-	3	15	85	±3800Ha	±1324Ha	± 12,9 M

Sumber: Data penelitian, 2018.

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa pada tahun 2016 frekuensi kebakaran berjumlah 94, jenis kebakaran bangunan berjumlah 15 dan kebakaran lahan berjumlah 85, luas bangunan yang terbakar berjumlah ± 3800 Ha dan luas kebakaran lahan berjumlah ± 1324 Ha, serta total kerugian berjumlah $\pm 12,9$ M.

Kemudian adapun data rekapitulasi kejadian kebakaran tahun 2017 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel I.3 : Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Tahun 2017 di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Kecamatan	Freq	BULAN												Jenis kebakaran		Luas M2	
			Jan	Feb	mar	apr	Mei	jun	Jul	ags	sep	okt	nov	des	Bangunan	Lahan	Bangunan	Lahan
1	Tebing tinggi	14	4	2	-	-	2	-	2	-	3	-	1	-	9	5	±1292M ²	±1.65Ha
2	Tebing tinggi timur	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	±24M ²	±32.1Ha
3	Tebing tinggi barat	8	1	3	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	2	6	±110M ²	±60.3Ha
4	Rangsang	9	1	-	-	-	-	1	1	3	-	3	-	-	-	9	-	±277Ha
5	Rangsang barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Rangsang pesisir	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	±30.1Ha
7	Tasik putri puyu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Merbau	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	± 24Ha	±109Ha
9	Pulau merbau	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		37	6	7	-	-	4	4	4	4	4	4	1	-	13	25	±1450Ha	±510Ha

Sumber : Data Penelitian, 2018.

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa pada tahun 2017 frekuensi kebakaran berjumlah 37, jenis kebakaran bangunan berjumlah 13 dan kebakaran lahan berjumlah 25, luas bangunan yang terbakar berjumlah ± 1450 Ha dan luas kebakaran lahan berjumlah ± 510 Ha.

Dijelaskan bahwa kecamatan yg akan di teliti oleh peneliti adalah:

1. Kecamatan Rangsang.
2. Kecamatan Rangsang Pesisir.
3. Kecamatan Merbau.

Dengan pertimbangan ketiga kecamatan ini merupakan kecamatan yang terkena karhutla yang paling luas dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.

Dari kasus tersebut dapat disayangkan terjadinya pembakaran lahan yang cukup luas terkhusus di daerah Kepulauan Meranti yang menyebabkan beberapa kerugian mulai dari panen kebun serta terjadinya polusi udara yang sangat tidak baik. Untuk itu BPBD serta aparat terkait dan masyarakat harus bekerja keras dalam mengantisipasi / melakukan pencegahan sebelum terjadinya bencana tersebut ataupun sebelum kerugian yang makin luas agar tercipta Provinsi Riau yang lebih aman dan nyaman. Seperti upaya-upaya pelestarian yang tidak dilakukan yang memiliki dampak buruk terhadap tumbuhan/tanaman, social ekonomi dan lingkungan hidup, sehingga kebakaran hutan dan lahan ini tidak saja berakibat buruk terhadap hutan dan lahannya mamun dapat mengakibatkan terganggunya segala bentuk proses pembangunan. Berkaitan dengan pentingnya rekontruksi pascabencana, sangat penting dinilai rekontruksi agar dapat mengurangi resiko bencana yang akan datang, mengingat bahwa ancaman

bencana akan selalu ada sejak awal upaya-upaya mengurangi ketahanan fisik, sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu setelah kejadian kegiatan rekontruksi, untuk memulihkan keadaan masyarakat supaya bisa bangkit kembali dari keadaan keterpurukan serta melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengantisipasi terjadinya bencana yang akan datang.

Berdasarkan observasi dilapangan, peneliti menemukan beberapa fenomena antara lain :

1. Berdasarkan data rekapitulasi kebakaran tahun 2016 dan 2017 Pemkab Kepulauan Meranti memang mampu menekan angka kebakaran hutan sehingga tidak menjadi kabupaten yang mengalami karhutla terparah. Namun pada tahun 2018 Kab Kepulauan Meranti mendapati posisi pertama penyumbang karhutla terluas yang hampir mencapai 1000 hektare.
2. Peran BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melakukan bentuk pencegahan karhutla seperti pendeteksian dan peringatan dini yang dinilai tidak berjalan dengan baik. Sehingga pencegahan yang dilakukan tidak dapat dimaksimalkan sehingga terlambatnya dalam melakukan antisipasi kerusakan yang lebih besar.
3. Kurangnya peran BPBD tersebut tidak hanya dari penanggulangan yang tidak terlaksana dengan baik namun dari segi rekontruksi yang dilakukan BPBD pasca bencana tidak berjalan sebagai mana mestinya.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan mengambil judul :**“Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan dan Rekonstruksi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti”**.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana dijelaskan pada latar belakang diatas, bahwa BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki wewenang dan tugas terhadap penanggulangan dan rekontruksi dampak kebakaran hutan dan lahan di kabupaten kepulauan meranti. Pada penelitian ini penulis menitik beratkan pada Peran BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penanggulangan dan rekontruksi dampak kebakaran hutan dan lahan di kabupaten kepulauan meranti yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Dari gejala-gejala yang berkembang yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan suatu masalah pokok dalam penelitian ini yakni : **“Bagaimanakah Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan dan Rekonstruksi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti?”**.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan

Meranti dalam Penanggulangan dan Rekonstruksi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu mengisi dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan ilmu administrasi, terkhusus ilmu administrasi publik.
- b. Kegunaan Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan masukan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan dan Rekonstruksi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- c. Kegunaan Akademis, yaitu penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan atau bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya untuk melakukan penelitian sejenis.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan karya ilmiah atau suatu penelitian diperlukan adanya konsep landasan atau pedoman sebagai dasar untuk mengemukakan dan memahami permasalahan penelitian agar tidak terjadi kesalah-pahaman dalam sebuah penelitian.

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan cita-cita Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Mensejahterakan Kehidupan Bangsa”, maka sebuah Negara perlu dikelola secara serius dan juga secara berkala dengan sebuah manajemen yang jelas. Ketika berbicara mengenai manajemen, tentu sangat identik dengan Negara Indonesia yang menganut sistem desentralisasi dalam mengatur dan mengelola pemerintahannya. Hal ini sangat dibutuhkan dalam sebuah manajemen, karena jika pengelolaannya tidak baik, maka peningkatan kesejahteraan tidak akan terwujud sesuai dengan harapan yang direncanakan.

Selanjutnya dapat dilihat konsep teori yang berhubungan dengan penelitian ini dan akan diuraikan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini. Karena penelitian ini membahas tentang sistem pemerintahan atau menyangkut tentang organisasi publik. Dan tentunya didalam sistem pemerintahan tidak terlepas dari yang namanya manajemen. Manajemen berkembang dan hidup layaknya sebuah sistem. Manajemen hadir dengan peran yang melekat sebagai penyatu semua unsur tersebut. Dikarenakan sebuah sistem yang baik tidak akan terwujud tanpa

bersatunya semua unsur-unsur tersebut. Dan berikut adalah penjelasan beberapa unsur dalam manajemen, antara lain:

1. Konsep Administrasi

Administrasi adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja kelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya, Handri Nawawi (dalam Inu Kencana 2003;5).

Seperti yang dikatakan oleh Siagian (2012;9) dalam bukunya bahwa administrasi didefinisikan sebagai seluruh proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Artinya administrasi itu tidak bisa bekerja sendiridalam melaksanakan pekerjaannya dan harus sesuai dengan logika dan akal sehat kita sebagai manusia.

Disamping itu, dalam pengertian luas administrasi bisa dilihat dari 3 sudut pandang, sehingga menghasilkan 3 pengertian menurut sudut pandangnya masing-masing oleh Anggara (2012;20) yaitu :

- a. Dari sudut proses, administrasi merupakan keseluruhan proses pemikiran, pengaturan, penentuan tujuan sehingga pelaksanaan kerja sehingga tujuan yang dimaksudkan tercapai.
- b. Dari sudut fungsi, administrasi merupakan keseluruhan aktivitas yang sadar dilakukan oleh setiap orang atau sekelompok orang yang berfungsi sebagai administrator atau pemimpin. Dalam kegiatan tersebut terdapat berbagai macam tugas (fungsi) kerja, misalnya tugas perencanaan, tugas mengorganisasi, tugas menggerakkan, tugas mengawasi, dan sebagainya.
- c. Dari sudut pandang kelembagaan, administrasi ditinjau dari manusia-manusia, baik secara perseorangan maupun kolektif yang menjalankan kegiatan-kegiatan guna mencapai hasil, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dari ketiga definisi diatas, muncul pertanyaan siapakah orang-orang dimaksud ada dalam administrasi secara luas? adapun orang-orang pengisi orgnisasi yang dimaksud dalam 3 definisi diatas menurut Anggara (2012; 21) adalah sebagai berikut:

- a. Administrator: orang yang menentukan dan mempertahankan tujuan

- b. Manajer: orang yang berlangsung memimpin pekerjaan kearah tercapainya hasil yang nyata.
- c. Pembantu Ahli : terdiri atas para ahli dalam setiap bidang, selaku penasihat (*brain-trust*)
- d. Karyawan : para pelaksana dan pekerja yang digerakan oleh manajer untuk berkerja, guna menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan.

Mulai dari sini lah kita bisa melihat bahwa adminitrasi memiliki ruang lingkup yang bergerak sangat luas dan tidak hanya sebatas proses ketika mengetik surat, pencatatan atau arti sempit lain nya. dan jika diperhatikan lebih seksama, sangat terlihat bahwa administrasi itu tidak hanya hadir sebagai sebuah proses sederhana yang mudah untuk disepelekan secara legalitas. Kenapa, Karena begitu spesifik pembahasan administrasi secara meluas dan mencakupi semua unsur yang ada didalamnya baik dari sumber daya manusianya, maupun dari sumber daya organisasi lainnya, dimana semua sumber daya organisasi itu disimpulkan dalam istilah 6M.

Dimana 6M itu adalah sebagai berikut:

- a. *Man*, yang artinya adalah manusia. Dalam organisasi manusia ini dikenal sebagai sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah sumber utama yang sangat menentukan keberlangsungan hidup sebuah organisasi. Karena jika sumber daya manusia suatu organisasi itu berkualitas, maka hdiup dari sebuah organsisasi akan berkualitas.
- b. *Money*, artinya uang. Uang yang dimaksud adalah sumber kekuatan utama kedua setelah manusia. Karena segala sesuatu pergerakan di dalam organisasi juga membutuhkan finansial.
- c. *Method*, yang artinya adalah metode atau cara. Cara yang dimaksud dalam hal ini adalah segala macam jalan, taktik, srategi dalam membuat sebuah organisasi itu menjadi sangat produktif dan berkelanjutan.
- d. *Machine*, yang artinya mesin. Mknanya adalah bahwa mesin ynag dimaksud merupakan perangkat-perangkat keras dalam organisasi yang membantu kelancaran beregeraknya sebuah organsiasi.
- e. *Material*, materi, bahan, dalam organisasi. Peralatan yang dimaksud adalah merupakan bahan baku dan semua peralatan lunak selain mesin yang berupa perangkat keras.
- f. *Market*, merupakan pasar, dalam organisasi publik market akan terealisasi dalam bentuk opini masyarakat. Semetra dalam organisasi

private atau bisnis, market benar-benar diartikan sebagai pasar untuk tempat terakhir dalam pemasaran produk.

Selain 6M diatas, ada baiknya juga dipahami apa saja yang sebenarnya menjadi unsur-unsur administrasi menurut Syafri (2012;11) yang menyajikan unsur-unsur administrasi menjadi 8 bagian, yaitu:

- a. Organisasi
Organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah pengelompokan orang dan pembagian tugas dan sekaligus tempat berlangsung berbagai aktivitas (proses) bagi pencapaian tujuan. Sebagai wadah organisasi berwujud kotak struktur yang menggambarkan hierarki, kedudukan dari orang-orang pengelompokan orang dan pekerjaan, pola hubungan antar bagian atau unit yang ada. Organisasi sebagai proses menggambarkan berlangsungnya berbagai aktivitas dari kelompok orang dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- b. Manajemen
Hakikat manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui orang lain. Oleh sebab itu manajemen merupakan rangkaian aktivitas menggerakkan kelompok orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Organisasi baru akan bermakna jika telah berlangsung proses manajemen.
- c. Komunikasi
komunikasi merupakan proses penyampaian pesan (informasi) dari seseorang kepada orang lain melalui saluran/media. Kelompok orang yang tergabung dalam suatu organisasi perlu melakukan komunikasi dengan pihak lain dalam usaha kerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Kepegawaian
kelompok orang yang tergabung dalam proses kerja sama suatu organisasi hanya akan menjadi kumpulan orang yang tidak bermanfaat jika tidak dilakukan pengaturan-pengaturan tentang siapa yang mengerjakan apa. Rangkaian aktivitas penyusunan dan pengatur pemanfaatan orang-orang yang diperlukan kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu merupakan aktivitas kepegawaian yang menjadi penting dalam administrasi.
- e. Keuangan
setiap tujuan yang ingin diraih memerlukan sejumlah uang. Tanpa ketersediaan dana, sejumlah atau seluruh kebijakan dan program tidak akan terlaksana yang berarti pula tidak tercapainya tujuan. Unsur keuangan dalam administrasi merupakan rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan segi-segi pembiayaan dalam usaha kerja sama pencapaian tujuan tertentu
- f. Pembekalan

selain organisasi, manajemen, komunikasi, kepegawaian, dan keuangan, perbekalan merupakan sumber daya penting untuk mendukung pencapaian tujuan tentu. Pembekalan merupakan sejumlah barang kebutuhan/peralatan yang diperlukan guna mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Rangkaian aktivitas merencanakan, mengadakan, menatur pemakaiannya, penyimpanan, pengendalian, perawatan, dan penghapusan barang-barang keperluan kerja dalam usaha kerjasama pencapaian tujuan tertentu merupakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi.

- g. **Tata Usaha**
tata usaha merupakan kegiatan pencatatan, pengolahan, pengumpulan, pemberian nomor/kode surat, pengetikan, penggandaan, penyimpanan, pengiriman, berbagai informasi yang diterima yang dikeluarkan oleh suatu organisasi/institusi dalam upaya kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
- h. **Hubungan Masyarakat**
hubungan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk hubungan menjaga eksistensi melalui pencapaian hubungan baik dan dukungan masyarakat sekeliling terhadap usaha kerja sama yang sedang dilakukan tersebut. Tanpa dukungan dan hubungan baik masyarakat sekeliling tujuan.

Delapan unsur diatas itu sudah sangat jelas untuk menjadi landasan utama untuk sebuah administratif yang baik dalam menempatkan diri ditengah-tengah birokrasi pemerintah dengan secara menyeluruh, maupun manajemen pengawasan yang begitu kompleks akan siklus kelanjutan hidupnya sebagai sebuah organisasi publik yang baik. Hal diatas tentunya harus dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti agar mampu melaksanakan administrasi dengan sebaik-baiknya. Dengan administrasi yang baik tentunya BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti bisa lebih mudah dalam melaksanakan tugas - tugasnya.

2. Konsep Organisasi

Organisasi merupakan salah satu unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas serta tempat berlangsung

bagai macam aktivitas bagi pencapaian tujuan sudah ditetapkan sebelumnya dengan komitmen tertentu.

Ada begitu banyak parah ahli yang memberikan pendapat mereka tentang organisasi. Salah satunya adalah Siagian (2015; 139) yang menyatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian rangka suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan seseorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Selain pengertian diatas menurut Siagian (2008; 96) hakikatnya organisasi itu dilihat dari sudut pandang. Pertama, organisasi dipandang sebagai “wadah” dan organisasi dipandang sebagai “proses” dimana ketika organisasi dipandang sebagai wadah maka organisasi merupakan tempat dimana kegiatan-kegiatan administratif dan manajemen dijalankan. Kemudian ketika organisasi dipandang sebagai proses maka organisasi akan menyoroti interaksi antara orang-orang di dalam organisasi itu.

Sementara itu jika membicarakan organisasi sebagai proses, maka akan terlihat bahwa hal lebih mengutamakan sorotan pada hubungan yang terjadi diantara seluruh anggota organisasi. Itu sebabnya mengapa organisasi sebagai proses lebih dominan pada sifatnya yang dinamis dibandingkan dengan organisasi sebagai wadah.

Hubungan informal antara anggota organisasi tidak diatur dalam peraturan secara legal melalui bentuk terstruktur melainkan didasarkan pada beberapa sifat nya oleh Siagian (2008; 96):

1. Hubungan yang didasarkan pada *personal relation*
2. Kesamaan keahlian para anggota organisasi
3. Kesamaan kepentingan dalam organisasi
4. Kesamaan minat dalam kegiatan-kegiatan diluar organisasi seperti olahraga, koperasi, dan lain-lain.

Dan berikutnya adalah jelas prinsip organisasi menurut Siagian (2008;97):

1. Terdapat tujuan yang jelas
2. Tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap orng didalam organisasi
3. Tujuan organisasi harus diterima oleh setiap orng dalam organisasi
4. Adanya kestuan arah
5. Adanya kesatuan perintah

6. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang
7. Adanya pembagian tugas
8. Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin
9. Pola dasar organisasi harus relative permanen
10. Adanya jaminan jabatan
11. Imbalan yang diberikan kepada setiap orang harus setimpal dengan jasa yang diebrikan
12. Penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya.

Ke 12 prinsip tersebut memiliki posisi paling penting jika ingin siklus kehidupan organisasi berjalan dengan kualitas yang baik. Walau tidak diketahui apakah hasil akhir benar akan sangat ideal sesuai dengan target, namun setidaknya ketika lini organisasi mengikut semua panduan dari awal secara teratur maka hasil yang diharapkan akan terwujud, walaupun meleset dari perkiraan dan tujuan biasanya tidak begitu jauh dari target yang sudah ditentukan.

Dari penjelasan diatas membuktikan bahwa organisasi BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti seharusnya mampu dalam menempatkan diri untuk dapat menghadapi tantangan lingkungan dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Jika BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti dapat menghadapi tantangan yang ada, maka organisasi ini bisa dinilai sebagai organisasi kuat, berkompeten dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Konsep Manajemen

Secara garis besar manajemen menurut Terry (2014: 1) adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan sekelompok orang kearah tujuan- tujuan organisasional atau maksud - maksud yang nyata

Manajemen menurut Siagian (2014;4) adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan- kegiatan orang lain. Definisi ini menekankan suatu keahlian yang harus dimiliki.

Karena pada hakikatnya manajemen itu merupakan sebuah nyawa penggerak dalam sebuah organisasi.

Dalam bukunya yang berjudul “Prinsip-Prinsip Manajemen” Terry (2009:9) mengatakan bahwa manajemen merupakan sebuah kegiatan, pelaksanaannya disebut *managing*, dan orang yang melakukannya disebut manajer.

Selain itu, dalam manajemen juga bisa didefinisikan dalam perspektif menurut Riva'i dkk (2013:177) adalah sebagai berikut :

- a. Menurut perspektif proses pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain, diaman kegiatan diawasi dan diselenggarakan.
- b. Definisi dari perspektif kolektivitas orang, dari sudut ini manajemen diartikan sebagai kolektivitas orang yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan manajerial.
- c. Pengertian manajemen menurut perspektif seni dan ilmu. Manajemen sebagai seni merupakan pengimplementasian dari keterampilan-keterampilan dalam pengelolaan organisasi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada dan bermanfaat. Sementara itu manajemen sebagai ilmu terlihat dari penerapannya terhadap proses mengobservasi, mengumpulkan, dan menganalisa data, fenomena-fenomena, kejadian-kejadian, dan lain-lain kemudian diambil beberapa kesimpulan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Terkait dengan pengertian manajemen yang dilihat dari 3 perspektif diatas, BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan organisasi publik yang membutuhkan definisi tersebut dalam pelaksanaannya secara menyeluruh. Karena BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti juga memiliki komponen organisasi yang begitu kompleks.

4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

MenurutSuparno (2014:2) Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang mencakup evaluasi terhadap kebutuhan SDM, mendapatkan orang-orang untuk memenuhi kebutuhan itu, dan mengoptimalkan pendayagunaan

sumber daya yang penting tersebut dengan cara memberikan insentif dan penugasan yang tepat agar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dimana SDM itu berada.

Selanjutnya menurut Hasibuan (2012; 10) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Kemudian Amirullah (2004; 206) mengemukakan Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan kegiatan yang mengatur tentang cara pengadaan tenaga kerja, melakukan pengembangan, memberikan kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga melalui proses-proses manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Menurut Sedarmayati (2007; 13) manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek “manusia” atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan dalam penilaian.

Artinya sebuah instansi dalam hal ini BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti bisa mendapatkan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas yang baik dan jujur dan berkualitas. Dari beberapa aspek yang sudah dijelaskan di atas sehingga dalam bekerja para SDM BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti mampu menunjang konsistensi sebuah organisasi dalam mencapai tujuan dengan baik.

5. Konsep Peran

Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status- status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan - harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban -

kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban - kewajibannya.

Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Sedangkan menurut Merton (dalam Raho, 2007:67) mengatakan bahwa peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Levinson (dalam Soekanto, 2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan - peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran serta dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peran. Parwoto (dalam Soehendy, 1997:28) mengemukakan bahwa peran serta mempunyai ciri-ciri:

1. Keterlibatan dalam keputusan: mengambil dan menjalankan keputusan.
2. Bentuk kontribusi : seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain.
3. Organisasi kerja : bersama setara (berbagi peran).
4. Penetapan tujuan : ditetapkan kelompok bersama pihak lain.
5. Peran masyarakat : sebagai subyek.

Sementaraitu Struktur Peran dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Peran Formal (Peran yang Nampak jelas)

Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga.

2. Peran Informal (Peran tertutup)

Yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan. Pelaksanaan peran - peran informal yang efektif dapat mempermudah peran - peran formal.

Peran BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menanggulangi bencana di daerah yaitu bentuk penyusunan kebijakan teknis yang meliputi bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan rekonstruksi.

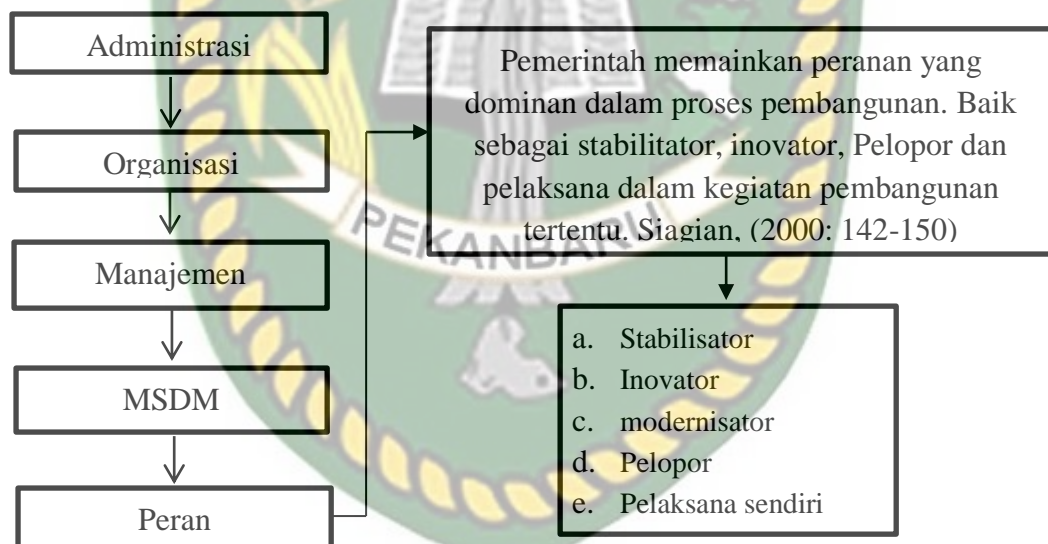
Dari peran BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut maka diharapkan mampu untuk menanggulangi dampak kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

B. Kerangka Pikir

Optimalisasi pencapaian tujuan yang diharapkan dari peran BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti yakni, peran dalam Penanggulangan dan Rekonstruksi Dampak Kebakaran Lahan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu diharapkan dengan adanya Peran yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti dapat menekan serendah mungkin angka kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam hal ini, berdasarkan dari variabel indikator ini yaitu “Peran BPBD” maka penulis menguraikan alur kerangka pemikiran dengan mendudukan empat indikator yang ada berdasarkan tugas BPBD point ke satu. Penulis mengambil keempat indikator tersebut sebagai indikator yang dijadikan ukuran dalam usulan penelitian tentang Peran BPBD dalam Penanggulangan dan Rekonstruksi dampak kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan empat indikator itu dapat dilihat dalam bagan kerangka pikir dibawah ini :

Gambar II.1 :Kerangka Pikir Penelitian Tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan dan Rekonstruksi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti.



Sumber: Hasil Modifikasi Penulis, 2018.

C. Hipotesis

Menurut Sugiono (2003:70) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan, maka hipotesis yang peneliti kemukakan dalam usulan penelitian ini adalah : “Diduga Peran Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan dan Rekonstruksi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak terlaksana dengan baik”.

Peran BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti akan terlaksana dengan baik apabila mampu melaksanakan 5 aspek sebagai indikator penilaian di bawah yaitu:

1. Stabilisator
2. Inovator
3. Modernisator
4. Pelopor
5. Pelaksana sendiri

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan memahami penelitian serta menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah-istilah yang dipergunakan, maka perlu dioperasikan konsep sebagai berikut :

1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah suatu kerjasama sekelompok orang membagi-bagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktivitas-aktivitas kearah pencapaian tujuan bersama.
3. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan

semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

4. Manajemen sumber daya manusia adalah proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimiliki berfungsi semaksimal mungkin bagi pencapaian tujuan sebuah organisasi.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana daerah.
6. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.
7. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, meliputi prabencana, tanggap darurat, pemulihan dini dan pasca bencana.
8. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.

9. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
10. Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif., melalui pendidikan, pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.
11. Inovator, dalam memainkan peran selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (legitimacy) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan inovasi dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu,

inovasi yang sifatnya konsepsional, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.

12. Modernisator, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.
13. Pelopor, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (role model) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.
14. Pelaksana sendiri, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan

yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

15. Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.

16. inovasi adalah sebagai proses dan atau hasil pengembangan pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang atau jasa), proses, dan sistem yang baru, yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan (terutama ekonomi dan sosial).

E. Operasional Variabel

Operasional Variabel dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator, item penilaian, dan skala yang direncanakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Tujuan operasional variabel ini adalah menjelaskan mengenai konsep-konsep utama dalam penelitian ini dan pengelompokan item penelitian yang mana sebagai variabel Peran BPBD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.1: Operasional Variabel Penelitian Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan dan Rekontruksi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4

<p>Menurut Siagian, (2000: 142-150) dalam pembangunan nasional. Peran adalah pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Baik sebagai stabilitator, inovator, Pelopor dan pelaksana dalam kegiatan pembangunan tertentu.</p>	<p>Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stabilisator 2. Inovator 3. Modernisator 4. Pelopor 5. Pelaksana sendiri 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Sosialisasi 3. Pelaksanaan Koordinasi 1. Inovasi 2. Keefektifan inovasi 1. Penguasaan ilmu pengetahuan 2. Mengasilkan SDM yang produktif 1. Kedisiplinan 2. Kepedulian lingkungan 1. Bertanggung jawab 2. Konsisten
--	--	---	---

Sumber: Hasil Modifikasi Penulis, 2018.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe kualitatif dengan metode penelitian survey deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan dan Rekonstruksi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Karena peneliti bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi yang detail terhadap objek penelitian, sehingga akan ditemukan kejadian-kejadian relative dan diperoleh gambaran yang sangat jelas dari hasil analisisnya.

Tipe penelitian kualitatif digunakan karena dapat lebih akurat dan terperinci. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, actual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama.

Metode ini juga disebut sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap yang ditemukan dilapangan. Metode penelitian kualitatif juga sering disebut metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*.

Selanjutnya sebagai alat untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data dan informasi yang diperoleh akan dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis dan menjelaskan Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti Terhadap Penanggulangan dan Rekonstruksi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

B. Lokasi penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka lokasi penelitian ini di Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun alasan peneliti memilih Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai lokasi penelitian yaitu dikarenakan peran BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti kurang menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sesuai regulasi yang telah mengaturnya. Dan diketahui baru dibentuknya BPBD serta tugas dan fungsinya yg terlebih dahulu di kerjakan oleh Damkar Kabupaten Kepulauan Meranti.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Penelitian ini diperoleh langsung dari responden dalam penelitian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui observasi, wawancara, dan angket (kuisisioner) berdasarkan kepada item penilaian mengenai Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan dan

Rekonstruksi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Data sekunder

Penelitian ini diperoleh melalui informasi dan keterangan intansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini berupa arsip, literatur serta laporan tertulis yang berhubungan dengan Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan dan Rekonstruksi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

D. Informan dan Key Informan

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Arikunto (2006:145) subjek penelitian adalah objek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Subjek penelitian merupakan sumber informasi yang di gali untuk mengungkapkan fakta-fakta di lapangan.

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Penentuan subjek penelitian atau responden dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling. Purposive sampling menurut Djaman Satori (2007:6) teknik pengambilan sampel yang ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian atau pertimbangan tertentu. Penelitian ini mengambil siapa saja yang menurut pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Adapun Penelitian ini terdiri atas 5 orang informan dan 1 orang key informan yaitu :

Tabel III. 1: Informan dan Key Informan Penelitian Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan dan Rekonstruksi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Responden Penelitian	Informan	Key Informan
1	Sekretaris BPBD	-	1
2	Kepala Pengarah BPBD	1	-
3	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	-
4	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	-
5	Kepala Damkar	1	-
6	Kepala Camat Kecamatan Rangsang	1	-
7	Kepala Camat Kecamatan Rangsang Pesisir	1	-
8	Kepala Camat Kecamatan Merbau	1	-
Jumlah		7	1

Sumber: Data Penelitian, 2018.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang valid yang dibutuhkan peneliti, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengantaran terhadap penelitian.

2. Wawancara

Adalah teknik mengumpulkan data dengan mengajukan tanya jawab oleh peneliti kepada yang berwenang sesuai dengan masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah kejadian saat penelitian. Pencatatan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan dianalisis secara deskriptif, yaitu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan dan hasilnya akan disajikan dan dilengkapi dengan uraian-uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat ditarik kesimpulan.

Usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap dalam aspek yang diamati dan diselidiki agar jelas keadaan kondisi sebenarnya. Penemuan fenomena dan gejala-gejala itu berarti tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk juga usaha menemukan hubungan satu dengan yang lainnya didalam aspek yang diteliti.

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas

1. Keadaan Kabupaten Kepulauan Meranti

a. Geografis

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu kabupaten di provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kotanya adalah Selatpanjang. Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Merbau, Pulau Ransang, Pulau Topang, Pulau Manggung, Pulau Panjang, Pulau Jadi, Pulau Setahun, Pulau Tiga, Pulau Baru, Pulau Paning, Pulau Dedap, Pulau Berembang, Pulau Burung. Adapun nama Meranti diambil dari nama gabungan "Pulau Merbau, Pulau Ransang dan Pulau Tebingtinggi".

Secara geografis kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar $0^{\circ} 42' 30'' - 1^{\circ} 28' 0''$ LU, dan $102^{\circ} 12' 0'' - 103^{\circ} 10' 0''$ BT, dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (*Growth Triagle*) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah *Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tj. Balai Karimun*. Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi sebagai

Gerbang Lintas Batas Negara/Pintu Gerbang Internasional yang menghubungkan dengan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut, hal ini untuk melengkapi [kota Dumai](#) yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota *Pusat Kegiatan Strategis Negara* yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri. Luas kabupaten Kepulauan Meranti : 3707,84 km², sedangkan luas kota Selatpanjang adalah 45,44 km². Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Di bagian utara Kabupaten Kepulauan Meranti berbatasan dengan Selat Malaka, Kabupaten Bengkalis
- Di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun dan Provinsi Kepulauan Riau
- Di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak,
- Sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987

b. Demografi

Laju pertumbuhan penduduk sebagai Kabupaten termuda di Provinsi Riau, Kabupaten Kepulauan Meranti, selama kurun sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000 hingga tahun 2010 adalah sekitar 0,60 persen.

Berdasarkan hasil sensus penduduk (SP) Badan Pusat Statistik (BPS) Bengkalis, yang tinggal pada tahun 2000 berjumlah sekitar 166,1 ribu jiwa dan SP pada tahun 2010 ini jumlah penduduk meningkat sekitar 176,4 ribu jiwa, yang terdiri dari 90.577 laki-laki, dan 85.794 perempuan. Laju pertumbuhan penduduk yang paling tinggi di kabupaten termuda ini adalah di Kecamatan Tebing Tinggi

Barat dengan angka sekitar 1,58 persen atau dari 13,0 ribu jiwa pada SP tahun 2000 menjadi 15,2 ribu jiwa pada SP tahun 2010 tahun ini.

Sedangkan yang terendah adalah di Kecamatan Rangsang Barat, sekitar 0,12 persen atau hasil SP pada tahun 2000 berjumlah 24,6 ribu jiwa menjadi 24,9 ribu jiwa pada SP 2010. Laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Tebing Tinggi(Kecamatan Tebing Tinggi Timur) 0,56 persen atau dari jumlah penduduk SP tahun 2000 berjumlah sekitar 62,2 ribu jiwa menjadi 65,8 ribu jiwa pada SP tahun 2010, di Kecamatan Rangsang laju pertumbuhan penduduk sekitar 0,87 persen dari jumlah penduduk pada SP tahun 2000 berjumlah 24,2 ribu jiwa menjadi 26,4 ribu jiwa pada SP 2010 tahun ini, dan di Kecamatan Merbau(Kecamatan Pulau Merbau) laju pertumbuhan penduduknya tembus sekitar pada angka 0,47 persen atau dari jumlah penduduk 42,1 ribu jiwa pada SP 2000 lalu menjadi 44,1 ribu jiwa pada SP tahun 2010.

23,48 Persen Penduduk Tidak Menetap Berdasarkan hasil sensus penduduk (SP) BPS Kabupaten Bengkalis tahun 2010, jumlah penduduk yang tinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan luas wilayah sekitar 3.760,13 Kilometer persegi, rata-rata kepadatan penduduk adalah sebanyak 47 jiwa per Kilometer persegi. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya yaitu Kecamatan Rangsang Barat, sebanyak 97 jiwa per Kilometer persegi, diikuti Kecamatan Tebing Tinggi sekitar 66 jiwa per Kilometer persegi.

Sedangkan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Tebing Tinggi Barat yakni 31 jiwa per Kilometer persegi. Sementara itu, dibandingkan dengan hasil pendataan yang terdaftar melalui catatan sipil setempat berjumlah

sekitar 230 ribu jiwa dan pendataan melalui SP BPS tahun 2010 penduduk Kepulauan Meranti, bahwa hanya berjumlah 175 ribuan saja yang tinggal di daerah tersebut. Dapat dikatakan bahwa, setidaknya sekitar 23 persen lebih penduduk yang terdaftar di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak menetap.

Dari data itu terdapat selisih besar dari 230 ribu jiwa menjadi 175 jiwa, penyusutan itu karna bahwa penduduk yang sudah tidak terdaftar di capil setempat tidak menetap di sana. Mungkin saja karena belajar dan bekerja di luar daerahnya dan warga ini masih tercatat di capilduk.

Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti terus mengalami peningkatan setiap tahun. Berdasarkan data terakhir Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kepulauan Meranti hingga Februari 2012 meningkat menjadi 238.412 ribu jiwa.

Panjang jalan dalam Kota Pekanbaru yaitu 2.463 kilometer, dengan penambahan jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang semakin hari semakin meningkat maka dapat diperkirakan bahwa penambahan jumlah kendaraan juga akan sangat pesat. Di tambah dengan terpusatnya perkembangan kota yang utama disepanjang Jalan Jendral Sudirman maka sudah sangat terasa kepadatan lalu lintas kota.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas serta ketertiban dalam pengguna fasilitas umum seperti jalan dan kendaraan, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan yaitu Tampan, Bukit Raya, Marpoyan Damai, Lima puluh, Sail, Pekanbaru Kota, Sukajadi, Senapelan, Rumbai, Payung

Sekaki, Rumbai Pesisir, Tenayan Raya dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 kelurahan/desa.

c. Fisiografi

Bentang alam kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar terdiri dari daratan rendah. Pada umumnya struktur tanah terdiri tanah alluvial dangrey humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah dan berhutan bakau (mangrove). Lahan semacam ini subur untuk mengembangkan pertanian, perkebunan dan perikanan. Pemandangan Alam Selat Air Hitam (Selatpanjang) Karakteristik dari jenis tanah ini adalah tergolong tanah dengan kedalaman solum cukup dalam dan bergambut (> 100 cm), tekstur lapisan bawah halus (liat) sedangkan lapisan atas merupakan Kemik (tingkat pelapukan sampai tingkat menengah), konsistensi tanah lekat, porositas tanah sedang, reaksi tanah tergolong sangat masam dengan pH berkisar antara 3,1–4,0 dan kepekaan terhadap erosi termasuk rendah. Formasi geologinya terbentuk dari jenis batuan endapan aluvium muda berumur holosen dengan litologi lempung, lanau, kerikil kecil dan sisa tumbuhan di rawa gambut, tidak ditemukan daerah rawan longsor karena arealnya datar, yaitu rawa gambut. Berdasarkan hasil penafsiran peta topografi dengan skala 1 : 250.000 diperoleh gambaran secara umum bahwa kawasan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar bertopografi datar dengan kelerengannya 0– 8%, dengan ketinggian rata-rata sekitar 1- 6,4 m di atas permukaan laut.

Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° - 32° Celcius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi. Musim hujan terjadi sekitar bulan September - Januari, dan musim kemarau terjadi sekitar bulan Februari hingga Agustus. Jenis flora yang terdapat di hutan Kabupaten Kepulauan Meranti antara lain, seperti : Meranti,

Kulim, Sungkai, Punak, Jelutung, Medang, Tembusu, Bintangor, dan Bakau. Sebagian besar jenis kayu tersebut merupakan jenis komersial dan bahan baku industri. Sementara jenis fauna yang ada di daerah ini, meliputi : Lutung, Siamang, Kera, Ungka, Pelanduk, Tringgiling, Babi Hutan, Ayam Hutan, berbagai jenis ular, berbagai jenis burung seperti Elang, Selendit, Puyuh Mahkota, Puyuh Biasa, Nuri, Enggang, Punai, Pergam, Lebah Madu dll. Di daerah ini juga terdapat beberapa sungai dan tasik (danau) seperti sungai Suir di pulau Tebingtinggi, sungai Merbau, sungai Selat Akar di pulau Padang serta tasik Putri Pepuyu di Pulau Padang, tasik Nembus di pulau Tebingtinggi), tasik Air Putih dan tasik Penyagun di pulau Rangsang. Gugusan daerah kepulauan ini terdapat beberapa pulau besar seperti pulau Tebingtinggi (1.438,83 km²), pulau Rangsang (922,10 km²), pulau Padang dan Merbau (1.348,91 km²).

Visi Pembangunan Provinsi Riau

Visi jangka panjang pembangunan Provinsi Riau hingga tahun 2020 merupakan cerminan dari komitmen seluruh masyarakat Riau yang telah disepakati dan ditetapkan berdasarkan Perda Provinsi Riau Nomor 36 tahun 2001 tentang pola dasar pembangunan daerah Provinsi Riau 2001-2005, yakni:

“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin dikawasan Asia Tenggara tahun 2020”

Guna melanjutkan visi pembangunan Provinsi Riau diatas, maka disusunlah visi antara pembangunan jangka menengah lima tahun kedua oleh kepala daerah yang

kemudian ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2009-2013, yaitu:

“Terwujudnya pembangunan ekonomi yang mapan dan pengembangan budaya Melayu secara profesional melalui kesiapan Infrastruktur dan peningkatan dalam masyarakat yang agamis”

Guna melanjutkan visi pembangunan Provinsi Riau diatas, maka disusunlah visi antara pembangunan jangka menengah lima tahun kedua oleh kepala daerah yang kemudian ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah (RPJMD).

Sebagai gambaran nyata dari penjabaran misi pembangunan Riau 2020, perlu adanya visi 5 tahun agar pada tiap tahap periode pembangunan jangka menengah tersebut dapat dicapai secara optimal. Sehingga dengan adanya pertimbangan terhadap tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskanlah visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2014-2019 sebagai berikut.

“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pematapan aparatur”

Misi Pembangunan Provinsi Riau

Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Riau tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan Insfrastruktur

2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan
 3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
 4. Menurunkan Kemiskinan
 5. Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik
 6. Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa
 7. Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan
 8. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata
 9. Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan
- d. Sosial Budaya

Dalam perkembangan Kabupaten Kepulauan Meranti kehidupan masyarakat terbentuk dari berbagai suku bangsa dan golongan etnik, seperti golongan asli Melayu setempat, Bugis, Makasar, Jawa, Tionghoa dan dari daerah lainnya. Golongan tersebut saling membaaur, berhubungan dan saling memengaruhi sehingga membentuk suatu persatuan baik sosial maupun budaya yang dicirikan dengan semangat berkompetisi dan sikap kegotongroyongan antar etnis tinggi dan mudah menerima perubahan sejalan dengan perkembangan zaman.

Dalam kehidupan sosial budaya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti selalu membentuk masyarakat dengan budaya Melayu Islami, misalnya dengan berbusana Melayu (Teluk Belanga bagi kaum pria dan busana muslimah bagi kaum wanita) pada hari atau acara-acara tertentu. Begitu juga di sekolah-sekolah, anak-anak dididikdibiasakan mengenal dan mengenakan busana Melayu pada hari-hari tertentu.

Selain itu upaya melestarikan Arab Melayu, sehingga nama jalan-jalan dan nama kantor instansi pemerintah harus ditulis dengan Arab Melayu. Demikian pula arsitek gedung-gedung pemerintah khususnya dan swasta umumnya harus menggambarkan arsitek Melayu, minimal terpasang di atasnya Selembayung.

2. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Misi dan visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

VISI

Terwujudnya Ketangguhan dan Keandalan Kabupaten Kepulauan Meranti Menghadapi Bencana Dalam Kerangka Menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti Sebagai Kawasan Niaga yang Maju dan Unggul Dalam Tatanan Masyarakat Madani.

MISI

1. Melindungi masyarakat kepulauan meranti dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana.
2. Membangun sistem pencegahan dan penanggulangan bencana yang handal dan terpadu

3. Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi dalam upaya rehabilitasi dan rekontruksi penanggulangan bencana
4. Memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan membangun kerjasama antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana
5. Meningkatkan peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana guna mendorong peningkatan investasi dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten kepulauan meranti.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SEKSI KESIAPSIAGAAN

MUKHTAROM

SEKSI LOGISTIK

SEKSI REKONTRUKSI

SEKSI KEBAKARAN HUTAN, LAHAN
DAN KECELAKAAN
EKA LIPTUS,SH

Sumber : Data Penelitian, 2018

UPT



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

C. Tugas dan Fungsi Organisasi

TUGAS

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana.
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
6. Mengendalikan pengumpulan uang dan barang.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
8. Menyiapkan tenaga penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat.
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan

kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

FUNGSI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti menyelenggarakan fungsi :

4. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
5. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya,



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas *Key Informant* dan *Informant*

Deskripsi identitas *key informant* dan *informant* merupakan identitas yang memberikan interpretasi terhadap objektivitas dari penelitian mengenai “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan dan Rekonstruksi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti”. Deskripsi identitas *key informant* dan *informant* dibagi menjadi 4 bagian yakni nama, umur, jenis kelamin, dan jenis pekerjaan.

Tabel V.1: Identitas *Key Informant* dan *Informant*

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan
1	Nurman,SH	Laki- laki	56	Sekretaris BPBD Meranti
2	Astina Yuliana,S.Pd.,M.AP	Perempuan	38	Subbag Umum dan Kepegawaian
3	Roni Samudra,SH	Laki - laki	48	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4	Sudarmadi,SP.,M.Si	Laki - laki	45	Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi
5	Sofian	Laki - laki	39	Kabid Damkar
6	Khairul amri. S.Sos	Laki - laki	49	Camat Rangsang
7	M Nasir	Laki - laki	42	Camat Rangsang Pesisir
8	Wan Abdul Malik	Laki - laki	37	Camat Merbau

Sumber: Olahan penulis dari hasil wawancara 2018

Dari tabel di atas yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah yakni Nurman,SH selaku Sekretaris BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebagai Sekretaris Pelaksana kegiatan untuk mengetahui apakah BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti sudah berperan dalam penanggulangan dan rekontruksi dampak kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan yang menjadi informan adalah Subbag Umum dan Kepegawaian, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi, Kabid Kedaruratan dan Logistik, Kabid Damkar dan Kepala Kecamatan berjumlah 3 orang, dengan adanya informan di atas merupakan acuan untuk mengukur apakah BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti berperan dalam penanggulangan dan rekontruksi dampak kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Kepulauan Meranti.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan Mengenai Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan dan Rekonstruksi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti

Dalam pembahasan bab ini, diuraikan hasil penelitian tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan dan Rekonstruksi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Peneliti mendapatkan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mewawancarai Sekretaris BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti, Subbag Umum dan Kepegawaian, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi, Kabid Kedaruratan dan Logistik, Kabid Damkar dan Kepala Kecamatan berjumlah 3 orang.

Pada penelitian ini, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, data yang didapat berasal dari wawancara yang telah dipilih sesuai dengan kriteria peneliti yang dianggap bisa mewakili dari penelitian yang diangkat. Narasumber yang dipilih adalah orang yang

mengetahui tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan dan Rekonstruksi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti, dimana terdapat 1 orang *key* informan dan 7 orang informan.

Adapun subjek dari penelitian ini yang dijadikan narasumber atau *key* informan adalah Nurman,SH selaku Sekretaris BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti. Wawancara ini meliputi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan indikator yang dibuat peneliti tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan dan Rekonstruksi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang berdasarkan indikator variabel penelitian yang ada pada 5 indikator peran menurut siagian, (20000:142-150) antara lain sebagai berikut:

1. Stabilikator
2. Inovator
3. Modernisator
4. Pelopor
5. Pelaksana sendiri

1. Stabilikator

Merupakan suatu kegiatan peran pemerintah yang memiliki tujuan mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif., melalui pendidikan, pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.

Dengan dilakukannya program ini, diharapkan BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti melalui kaid pencegahan dan kesiapsiagaan mampu untuk berperan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta dapat mengedukasi masyarakat agar tetap peduli

terhadap lingkungan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Nurman selaku sekretaris BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti melalui wawancara penulis pada hari Selasa tanggal 20 desember 2018 pukul 09.00 WIB di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti:

“Tentunya baik penyuluhan/ sosialisasi yang mengedukasi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti terkhusus di Kecamatan Rangsang , Rangsang Pesisir dan Merbau mengenai bagaimana pentingnya menjaga kelestarian lingkungan secara umum, kami sudah melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang menjaga lingkungan terkhusus hutan dan lahan serta bagaimana dampak yang ditimbulkan. Dengan harapan agar masyarakat dapat teredukasi dengan baik.”

(Wawancara dengan bapak Nurman)

“Kalau untuk sosialisasi terkhusus di Kecamatan Rangsang, Rangsang Pesisir dan Merbau dapat dikatakan tidak sering dilakukan dikarnakan BPBD tidak hanya berfokus kepada 3 kecamatan tersebut tetapi Kabupaten Kepulauan Meranti secara keseluruhan.”

(Wawancara peneliti dengan bapak Nurman)

“Alasannya dikarnakan masyarakat sekitar kurang peduli terhadap bentuk kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang kami lakukan di lingkungan mereka.”

(Wawancara peneliti dengan bapak Nurman)

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh bapak Nurman selaku Sekretaris BPBD Kepulauan Meranti mengenai penyuluhan/ sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwasannya BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti kurang berperan dan pada kenyataannya BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti jarang melakukan Sosialisasi/ penyuluhan di Kcamatan rangsang, Rangsang Pesisir dan Merbau dengan alasan warga masyarakat Kecamatan tersebut tidak menyambut dengan baik terhadap bentuk sosialisasi

apapun yang berkaitan dengan karhutla sehingga bisa dipastikan kemungkinan besar masyarakat Kecamatan tersebut tidak mendapatkan edukasi yang baik tentang bahaya dari kebakaran hutan dan lahan melalui sosialisasi/ penyuluhan tersebut.

Kemudian peneliti juga mewawancarai bapak Roni Samudra, SH selaku kabid pencegahan dan kesiapsiagaan pada hari kamis tanggal 20 Desember 2018 pukul 09.30 di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti:

“Baik sosialisasi maupun penyuluhan di kampung dalam telah beberapa kali kami lakukan.”

(Wawancara dengan bapak Roni Samudra)

“Kalau dibilang efektif tentu belum bisa dikatakan efektif karena pihak kami pun sebenarnya sedikit mengalami kesulitan untuk melakukan sosialisasi, sebenarnya bukan sosialisasinya yang sulit tetapi partisipasi masyarakat kampung dalam sendiri sangat kurang untuk mengikuti setiap kegiatan - kegiatan yang kami lakukan di sana .”

(Wawancara dengan bapak Roni Samudra)

Berdasarkan pernyataan dari bapak Roni Samudra selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti kurang berperan melakukan sosialisasi/penyuluhan walaupun BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan sosialisasi/penyuluhan di Kecamatan Rangsang, Rangsang Pesisir dan merbai sebagai salah satu langkah pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan namun pada kenyataannya penyuluhan/ sosialisasi tersebut tidak sering dilakukan dengan alasan kurangnya partisipasi masyarakat Kecamatan Rangsang, Rangsang Pesisir dan merbau sehingga dapat dipastikan dengan kurangnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat untuk mengikuti penyuluhan tersebut menjadikan tujuan dilakukannya penanggulangan karhutla melalui

penyuluhan/ sosialisai tidak dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat 3 kecamatan tersebut.

Kemudian peneliti juga mewawancarai Camat Kecamatan Rangsang Khairul Amri, S.Sos pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2018 pukul 10.00 WIB di Kantor Camat Kecamatan Rangsang:

“Pernah namun hanya beberapa kali dilakukan sosialisasi maupun penyuluhan karhutla oleh BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti di kecamatan kami ini”

(Wawancara Peneliti dengan Bapak Khairul Amri, S.Sos)

“Sebenarnya masyarakat di sini tidak terlalu suka diadakannya sosialisasi atau kegiatan apapun yang menyinggung karhutla sehingga partisipasi masyarakat untuk mengikuti sosialisasi itu juga kurang sekali..”

(Wawancara Peneliti dengan Bapak Khairul Amri, S.Sos)

Berdasarkan pernyataan dari Camat Kecamatan Rangsang, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwasannya BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti kurang berperan dalam melakukan sosialisasi/ penyuluhan dikarenakan hanya beberapa kali dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti dan pada kenyataannya dengan kata lain sosialisasi/ penyuluhan memang tidak sering dilakukan sehingga masyarakat Kecamatan Rangsang kurang memperoleh informasi akan bahaya karhutla.

Kemudian peneliti juga mewawancarai Camat Kecamatan Rangsang Pesisir M. Nasir pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 pukul 09.00 WIB di Kantor Camat Kecamatan Rangsang pesisir:

“Kebetulan saya baru menjadi camat di kecamatan rangsang pesisir ini, namun saya belum pernah mendengar adanya penyuluhan/sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti di kecamatan kami ini”

(Wawancara Peneliti dengan Bapak M. Nasir)

Berdasarkan pernyataan dari Camat Kecamatan Rangsang Pesisir, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwasannya BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti kurang berperan dalam melakukan sosialisasi/ penyuluhan dikarenakan dalam beberapa bulan terakhir tidak pernah diadakannya sosialisasi kekecamatan tersebut oleh BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti dan pada kenyataannya dengan kata lain sosialisasi/ penyuluhan memang tidak sering dilakukan sehingga masyarakat Kecamatan Rangsang Pesisir kurang memperoleh informasi akan bahaya karhutla.

Kemudian peneliti juga mewawancarai Camat Kecamatan Merbau Bapak Wan Abdul Malik pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2018 pukul 09.00 WIB di Kantor Camat Kecamatan Merbau:

“Beberapa kali pihak BPBD memang pernah melakukan penyuluhan/sosialisasi, namun sedikit sekali partisipasi yang diberikan oleh masyarakat kami seperti adanya penyuluhan/sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti di kecamatan ini.”

(Wawancara Peneliti dengan Bapak Wan Abdul Malik)

Berdasarkan pernyataan dari Camat Kecamatan Merbau, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwasannya BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti kurang berperan dalam melakukan sosialisasi/ penyuluhan dikarenakan sedikitnya partisipasi masyarakat di kecamatan ini sangat minim dan pada kenyataannya dengan kata lain sosialisasi/ penyuluhan memang dilakukan tetapi hanya sedikit sekali masyarakat Kecamatan Merbau kurang memperoleh informasi akan bahaya karhutla.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai koordinasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti melalui sekretaris BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti

bapak Nurman pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2018 pukul 09.00 di Kantor BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti:

“Tentu, di setiap kegiatan yang akan kami laksanakan di kabupaten kepulauan meranti ataupun dimana pun tempatnya kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Baik ketika akan melakukan sosialisasi dll kami selalu berkoordinasi.”

(Wawancara dengan bapak Nurman)

“Seperti mengirimkan surat secara tertulis ataupun langsung mengunjungi kantor kecamatan tempat tersebut.”

(Wawancara dengan bapak Nurman)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti bapak Nurman maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti berperan dalam melakukan koordinasi Kelurahan untuk penanggulangan karhutla di Kecamatan Rangsang, Rangsang Pesisir, merbau dan pada kenyataannya BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti selalu melakukan koordinasi kepada pihak Kecamatan tersebut.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai koordinasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti melalui kapid pencegahan dan kesiapsiagaan bapak Roni Samudra pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 pukul 09.30 di kantor BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti:

“Tentunya kami selalu berkoordinasi dengan semua pihak terkait dalam hal ini Camat Kecamatan Rangsang. Disetiap kami ingin melaksanakan sosialisasi maupun penyuluhan tentu kami juga butuh peran dari Camat dan jajarannya untuk ikut serta baik dalam hal menentukan tempat ataupun lokasi penyuluhan maupun hal- hal pendukung lainnya.”

(wawancara dengan bapak Roni Samudra)

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh bapak Roni Samudra selaku Kabid penanggulangan dan Kesiapsiagaan maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwasannya BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti berperan dalam koordinasi dengan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penanggulangan dan rekontruksi dampak kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti dan pada kenyataannya koordinasi telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti terkhusus ketika akan melaksanakan penyuluhan ataupun sosialisasi.

Peneliti juga bertanya mengenai koordinasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap Kecamatan Rangsang bapak Khairul Amri pada Hari jumat tanggal 28 Desember 2018 pukul 10.00 di Kantor Camat Kecamatan Rangsang:

“Pihak BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kami ketika ingin melakukan kegiatan - kegiatan yang berkaitan tentang karhutla seperti akan dilakukannya penyuluhan/ sosialisasi yang akan dilaksanakan di sini.”

(Wawancara peneliti dengan bapak Khairul Amri)

“Pihak BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti berkoordinasi dengan kami ketika akan melakukan kegiatan di sini dan kami selaku pihak kelurahan selalu menyambutnya dengan baik apalagi hal tersebut untuk kebagikan masyarakat di sini. Bentuk koordinasinya seperti mereka menyurati dan berkunjung langsung ke kantor kami untuk menyampaikan tujuannya seperti ketika ingin melakukan sosialisasi/ penyuluhan di sini.”

(Wawancara peneliti dengan bapak Khairul Amri)

Dari Pernyataan oleh Camat Rangsang dalam maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti berperan dalam berkoordinasi dengan Kecamatan Rangsang dalam dan pada kenyataannya BPBD Kabupaten

Kepulauan Meranti telah melakukan koordinasi terkhusus ketika ingin melaksanakan sosialisasi/ penyuluhan karhutla di Kecamatan Rangsang.

Peneliti juga bertanya mengenai koordinasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap Kecamatan Rangsang Pesisir bapak M Nasir pada Hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 pukul 10.00 di Kantor Camat Kecamatan Rangsang Pesisir:

“Biasanya BPBD Kabupaten Kepulauan Merantisaat ingin melakukan kegiatan di desa ini selalu melakukan koordinasi dengan kami terlebih dahulu.”

(Wawancara peneliti dengan bapak M Nasir)

Dari Pernyataan oleh Camat Rangsang Pesisir dalam maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti berperan dalam berkoordinasi dengan Kecamatan Rangsang Pesisir dalam dan pada kenyataannya BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan koordinasi terkhusus ketika ingin melaksanakan sosialisasi/ penyuluhan karhutla di Kecamatan Rangsang Pesisir.

Peneliti juga bertanya mengenai koordinasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap Kecamatan Merbau bapak Wan Abdul Malik pada Hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 pukul 10.00 di Kantor Camat Kecamatan Merbau:

“Apapun kegiatannya baik penyuluhan, sosialisasi ataupun kegiatan yang lainnya pihak BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti selalu melakukan koordinasi dengan kami.”

(Wawancara peneliti dengan bapak Wan Abdul Malik)

Dari Pernyataan oleh Camat Merbau dalam maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti berperan dalam berkoordinasi

dengan Kecamatan Merbau dalam dan pada kenyataannya BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan koordinasi terkhusus ketika ingin melaksanakan sosialisasi/ penyuluhan karhutla di Kecamatan Merbau.

2. Inovator

Dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan inovasi yang dilakukan bisa untuk membantu mendorong keefektifan BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menjalankan perannya. Untuk itu peneliti bertanya mengenai inovasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti melalui sekretaris BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti bapak Nurman pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 pukul 09.00 di Kantor BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti:

“Tidak banyak inovasi yang dilakukan terhadap penanggulangan dan rekonstruksi kebakaran hutan dan lahan di kabupaten kepulauan meranti ini. Selain hanya bentuk pemadaman saja.”

(Wawancara peneliti dengan bapak Nurman)

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh sekretaris BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti berkaitan dengan inovasi maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwasannya BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti seharusnya berperan dalam melakukan inovasi dan pada kenyataannya BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti kurang berperan memberikan inovasi terhadap karhutla ini dikarenakan terbatasnya anggaran yang diterima untuk memberikan inovasi yang baik.

Peneliti juga bertanya mengenai inovasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti melalui kabid rehabilitasi dan rekonstruksi bapak Sudarmadi,SP.,M.Si pada Hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 pukul 10.30 WIB di kantor BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti:

“Tidak ada inovasi yang kami lakukan terkhusus untuk penanggulangan dan rekontruksi dampak kebakaran hutan dan lahan ini. Karna slama ini slalu ada persepsi bahwa kebakaran hutan dan lahan itu bukanlah bagian dari bencana alam karna sekitar 80% lebih kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kabupaten kepulauan meranti ini adalah ulah manusia bukan alam.”

(Wawancara Peneliti dengan bapak Sudarmadi)

“Untuk inovasi rekontruksi kami lebih menfokuskan kepada abrasi. Walaupun belum dapat memberikan dampak yang bagus untuk penanggulangannya itu sendiri.”

(Wawancara Peneliti dengan bapak Sudarmadi)

Berdasarkan penyampaian yang telah diberikan oleh Kabid rehabilitasi dan rekontruksi BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai inovasi yang dilakukan dalam penanggulangan dan rekontruksi kebakaran hutan dan lahan maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti seharusnya berperan dalam melakukan inovasi dan pada kenyataannya BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti tidak berperan dalam penanggulangan dan rekontruksi dampak kebakaran hutan dan lahan.

Peneliti juga bertanya mengenai inovasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap Kecamatan Rangsang bapak Khairul Amri pada Hari kamis tanggal 28 Desember 2018 pukul 10.00 di Kantor Camat Kecamatan Rangsang:

“setau saya tidak banyak inovasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penanggulangan dan rekontruksi karhutla ini selain hanya upaya pemadaman.”

(Wawancara peneliti dengan Bapak Khairul Amri)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Khairul Amri mengenai inovasi yang diberikan kepadanya oleh BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti seharusnya berperan memberikan inovasi penanggulangan dan rekonstruksi dampak kebakaran hutan dan lahan dan pada kenyataannya BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti kurang berperan memberikan inovasi penanggulangan dan rekonstruksi dampak kebakaran hutan dan lahan.

Peneliti juga bertanya mengenai keefektifan inovasi yang dilakukan inovasi penanggulangan dan rekonstruksi dampak kebakaran hutan dan lahan melalui bapak Nurman, SH selaku sekretaris BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 pukul 10.00 di Kantor BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti:

“hanya bentuk inovasi berupa pemadaman yang kami lakukan untuk kebakaran hutan dan lahan ini. Dan sejauh ini cukup berjalan efektif.”

(Wawancara Peneliti dengan bapak Nurman)

Dari pernyataan yang telah disampaikan bapak Nurman selaku sekretaris BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti berperan efektif dalam melakukan inovasi terhadap penanggulangan dan rekonstruksi dampak karhutla walaupun pada kenyataannya seharusnya BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti mampu memberikan inovasi yang lebih dan hanya melakukan bentuk pemadaman saja.

Peneliti juga bertanya mengenai keefektifan inovasi yang dilakukan inovasi penanggulangan dan rekonstruksi dampak kebakaran hutan dan lahan melalui bapak Sudarmadi.SP.,M.Si selaku kabid rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 pukul 10.00 di Kantor BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti:

“dikarnakan tidak banyak inovasi yang kami lakukan terhadap karhutla ini selain hanya upaya pemadaman saja, dan sejauh ini untuk keefektifan pemadaman sudah cukup berjalan efektif.”

(Wawancara Peneliti dengan bapak Sudarmadi)

Dari pernyataan yang telah disampaikan bapak Sudarmadi selaku kabid rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti berperan efektif dalam melakukan inovasi terhadap penanggulangan dan rekontruksi dampak karhutla walaupun pada kenyataannya seharusnya BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti mampu memberikan inovasi yang lebih dan hanya melalukan bentuk pemadaman saja.

3. Modernisator

Merupakan peranan pemerintah dalam melakukan pembangunan agar menjadi negara yang kuat, mandiri dan diperlakukan sederajat dengan negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan dan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang produktif serta memiliki visi misi yang jelas tentang masa depan yang di inginkan sehingga mampu berorientasi pada masa depan. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada sekretaris BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti bapak Nurman mengenai penguasaan ilmu pengetahuan yang dimiliki karyawan BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti pada hari Kamis tanggal 20 Desember pukul 09.00 WIB di Kantor BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti:

“Untuk penguasaan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan kami itu sangat minim, terlebih tentang penanggulangan dan rekontruksi karhutla di kabupaten kepulauan meranti ini.”

(Wawancara peneliti dengan bapak Nurman)

“upaya meningkatkan pengetahuan itu sendiri tidak sering kami lakukan hanya berupa penyampaian seperti diskusi kecil saja.”

(Wawancara peneliti dengan bapak Nurman)

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh sekretaris BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai penguasaan ilmu pengetahuan karyawan BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasannya BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti kurang berperan dalam memiliki ilmu pengetahuan tentang penanggulangan dan rekonstruksi karhutla walaupun pada kenyataannya BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti ada melakukan beberapa penyampaian dalam bentuk diskusi kepada karyawan BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti namun dalam kenyataannya pihak BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti tetap kurang memiliki pengetahuan tentang penanggulangan dan rekonstruksi karhutla itu sendiri.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada kabid rehabilitasi dan rekonstruksi pada BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti bapak Sudarmadi mengenai penguasaan ilmu pengetahuan yang dimiliki karyawan BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti pada hari jumat tanggal 21 Desember 2018 pukul 10.00 WIB di kantor BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti:

“Kalau untuk penguasaan ilmu pengetahuan terkait penanggulangan dan rekonstruksi karhutla ini sangat terbatas. Jujur saja hanya saya dan kabid penanggulangan yang paham.”

(Wawancara Peneliti dengan bapak Sudarmadi)

“Ada, hanya berbentuk penyampaian kecil saja yang saya berikan dan kabid pencegahan.”

(Wawancara Peneliti dengan bapak Sudarmadi)

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh kabid rehabilitasi dan rekonstruksi mengenai penguasaan ilmu pengetahuan karyawan BPBD

Kabupaten Kepulauan Meranti maka peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti kurang berperan dalam penguasaan ilmu pengetahuan tentang penanggulangan dan rekonstruksi karhutla dan pada kenyataannya BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti telah memberikan beberapa penyampaian tentang penanggulangan dan rekonstruksi itu kepada pegawai BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada sekretaris BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti bapak Nurman mengenai menghasilkan SDM yang produktif pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 pukul 09.00 WIB di Kantor BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti:

”Untuk menghasilkan SDM yang produktif dari pegawai yang kami miliki menurut saya itu semua belum cukup untuk dikatakan produktif.”

(Wawancara peneliti dengan bapak Nurman)

“Dikarnakan baru dibentuknya BPBD kabupaten kepulauan meranti ini membuat kami sangat kekurangan SDM yang produktif dan handal.”

(Wawancara peneliti dengan bapak Nurman)

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasannya BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti harus memberikan bembekalan ilmu kepada pegawai BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti agar memiliki SDM yang produktif dan dapat diandalkan.”

Peneliti juga melakukan wawancara kepada subbag umum dan kepegawaian BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti ibu Astina Yuliana mengenai menghasilkan SDM

yang produktif BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 pukul 14.30 WIB di Kantor BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti:

“Untuk hal itu, kami sangat kesulitan untuk mengasihkan SDM yang produktif saat ini.”

(Wawancara peneliti dengan ibu Astina Yuliana)

“Baru 2 tahun di bentuknya BPBD ini membuat kami kesulitan dalam memiliki SDM yang produktif, sebagian besar pegawai yang kami miliki merupakan bukan pegawai tetap, melainkan pegawai honor.”

(Wawancara peneliti dengan ibu Astina Yuliana)

“Kalau dari saya sendiri sudah menganjurkan agar diadakannya study banding kepada pegawai yang kami miliki namun belum terlaksana.”

(Wawancara peneliti dengan ibu Astina Yuliana)

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh Subbag Umum dan Kepegawaian Ibu Astina Yuliana maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasannya BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti masih belum memiliki SDM yang produktif dan diharapkan BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti dapat memiliki jalan alternatif agar dapat lebih menghasilkan SDM yang lebih baik.

4. Pelopor

Merupakan pemerintah harus mampu menjadi panutan bagi seluruh rakyat. Dengan hal ini BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan mampu menjadi panutan bagi rakyat Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya baik dalam hal bekerja

secara produktif, disiplin ataupun menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Untuk itu peneliti bertanya mengenai keproduktifan dalam bekerja yang dilakukan BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti melalui sekretaris BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti bapak Nurman pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 pukul 09.00 di Kantor BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti:

“Tentu saja, sejauh ini kami selalu berusaha bekerja secara produktif agar tidak mengecewakan masyarakat juga.”

(Wawancara peneliti dengan bapak Nurman)

“Seperti disaat ada laporan dari masyarakat tentang karhutla ataupun bangunan kami selalu berusaha sigap dan selalu siaga dalam memberikan pelayanan yang maksimal.”

(Wawancara peneliti dengan bapak Nurman)

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh sekretaris BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti berkaitan dengan keproduktifan dalam bekerja maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwasannya BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti cukup produktif dalam bekerja dan pada kenyataannya BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti selalu memberikan usaha semaksimal mungkin dalam berkerja agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik.

Peneliti juga bertanya mengenai keproduktifan dalam bekerja yang dilakukan BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti melalui kabid damkar bapak Sofian pada Hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 pukul 10.00 WIB di kantor BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti:

“Sejauh ini kami selalu terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dari pihak damkar sendiri, terlebih apabila ada laporan kebakaran kami selalu bekerja semaksimal mungkin agar tidak mengecewakan masyarakat.”

(Wawancara Peneliti dengan bapak Sofian)

“Untuk kendala mungkin hanya dari segi akses, terkadang jalan yang kami lewati itu padat kendaraan sehingga menyulitkan kami agar dapat sampai dengan cepat kelokasi.”

(Wawancara Peneliti dengan bapak Sofian)

Berdasarkan penyampaian yang telah diberikan oleh Kabid damkar BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai keproduktifan dalam bekerja maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti cukup produktif dalam bekerja walaupun pada kenyataannya hambatan selalu ada dalam usaha tersebut.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada sekretaris BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti bapak Nurman mengenai kepedulian lingkungan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 pukul 09.00 WIB di Kantor BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti:

”Tentu saja, setiap pegawai di ajarkan agar peduli kepada lingkungan yang ada di kabupaten kepulauan meranti ini terkhusus juga lingkungan yang ada di sekitar kantor.”

(Wawancara peneliti dengan bapak Nurman)

“Contoh nya seperti saat akhir pekan kami slalu rutin untuk bergotong royong membersihkan lingkungan kantor, dan sesekali di setiap bulan kami mengadakan sosialisasi tentang kepedulian lingkungan dengan sekolah sekolah yang ada di kabupaten kepulauan meranti.”

(Wawancara peneliti dengan bapak Nurman)

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasannya BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti berperan dalam kepedulian terhadap lingkungan dan pada kenyataannya BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti rutin dalam melakukan sosialisasi terhadap kepedulian lingkungan dengan sekolah sekolah yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.”

Peneliti juga melakukan wawancara kepada subbag umum dan kepegawaian BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti ibu Astina Yuliana mengenai kepedulian lingkungan BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 pukul 14.30 WIB di Kantor BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti:

“Untuk sejauh ini seluruh pegawai BPBD masih tetap peduli terhadap lingkungan sekitar lingkungan perkantoran.”

(Wawancara peneliti dengan ibu Astina Yuliana)

“Terkadang kami juga melakukan beberapa sosialisasi ke sekolah sekolah yang ada di sekitar sini, memang tidak rutin tapi pernah beberapa kali.”

(Wawancara peneliti dengan ibu Astina Yuliana)

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh Subbag Umum dan Kepegawaian Ibu Astina Yuliana maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasannya BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti berperan terhadap kepedulian lingkungan dan pada kenyataannya BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti beberapa kali juga melakukan sosialisasi terhadap kepedulian terhadap lingkungan.

5. Pelaksana Sendiri

Merupakan kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak lain melainkan harus dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Dengan ini diharapkan BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti Mampu melaksanakan kegiatan itu dengan tanggung jawab dan tetap konsisten dalam pelaksanaannya. Untuk itu peneliti bertanya mengenai tanggung jawab yang dilakukan BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti melalui sekretaris BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti bapak Nurman pada hari kamis tanggal 20 Desember 2018 pukul 09.00 di Kantor BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti:

“Tentu saja kami selalu bertanggung jawab dengan tugas yang kami lakukan.”

(Wawancara peneliti dengan bapak Nurman)

“Untuk kelalaian dalam bekerja kami selalu fokus terhadap pekerjaan ini khususnya dengan laporan laporan terkait berbagai bentuk laporan kebakaran yang kami terima.”

(Wawancara peneliti dengan bapak Nurman)

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh sekretaris BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti berkaitan dengan tanggung jawab maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwasannya BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas baik terhadap laporan laporan yang mereka terima terkhusus laporan kebakaran-kebakaran yang terjadi.

Peneliti juga bertanya mengenai tanggung jawab yang dilakukan BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti melalui kabid damkar bapak Sofian pada Hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 pukul 10.00 WIB di kantor BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti:

“Sesuai visi misi BPBD dalam mewujudkan kehandalan kabupaten kepulauan meranti dalam menghadapi bencana kami memang harus dituntut slalu bertanggung jawab dalam setiap tugas yang kami lakukan.”

(Wawancara Peneliti dengan bapak Sofian)

“Sejauh ini belum pernah dan insyaallah kami slalu akan bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan kepada kami.”

(Wawancara Peneliti dengan bapak Sofian)

Berdasarkan penyampaian yang telah diberikan oleh Kabid damkar BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai tanggung jawab maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti cukup bertanggung jawab dalam bekerja dan selalu berusaha memberikan yang terbaik.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada sekretaris BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti bapak Nurman mengenai konsistensi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 pukul 09.00 WIB di Kantor BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti:

”Untuk konsistensi BPBD kami sangat konsisten khususnya dalam penanggulangan bencana yang terjadi, demi nyamannya masyarakat kabupaten kepulauan meranti kami harus tetap semangat dalam bekerja.”

(Wawancara peneliti dengan bapak Nurman)

“Untuk hal itu kami sangat menindak secara tegas apabila ada pegawai yang tidak serius dalam bekerja ataupun bersikap tak peduli terhadap perintah.”

(Wawancara peneliti dengan bapak Nurman)

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasannya BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti berperan cukup konsisten dalam penanggulangan dan rekonstruksi karhutla di Kabupaten Kepulauan Meranti dan pada kenyataannya BPBD

Kabupaten Kepulauan Meranti sangat menindak secara tegas terhadap pegawai yang tidak konsisten ataupun mengabaikan tugas dan perintah.”

Peneliti juga melakukan wawancara kepada subbag umum dan kepegawaian BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti ibu Astina Yuliana mengenai konsisten BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 pukul 14.30 WIB di Kantor BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti:

“Kami cukup konsisten dalam melakukan penanggulangan dan rekonstruksi kaarhutla di kabupaten kepulauan meranti.”

(Wawancara peneliti dengan ibu Astina Yuliana)

“kalau untuk tindakan secara tegas itu saya juga tidak bisa melakukannya dikarnakan juga kami kekurangan pegawai yang ada terlebih mereka sebagian besar tenaga honorer, mungkin hanya berupa teguran kecil saja.”

(Wawancara peneliti dengan ibu Astina Yuliana)

“Ya, ada beberapa pegawai yang kadang lalai dalam melaksanakan perintah.”

(Wawancara peneliti dengan ibu Astina Yuliana)

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh Subbag Umum dan Kepegawaian Ibu Astina Yuliana maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasannya BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti berperan terhadap konsisten dalam bekerja dan pada kenyataanya BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti tidak cukup berani menindak secara tegas apabila ada pegawai yang tidak konsisten atau lalai dalam bekerja beberapa kali juga melakukan sosialisasi terhadap kepedulian terhadap lingkungan.

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh *key* informan dan informan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa BPBD Kabupaten Kepulauan kurang berperan

dalam melakukan penanggulangan dan rekonstruksi dampak kebakaran hutan dan lahan di kabupaten kepulauan meranti dengan baik, masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya di lapangan masih belum bisa dikatakan maksimal dengan banyaknya kendala di lapangan seperti disaat melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan yang mana masyarakat di Kecamatan Rangsang, Rangsang Pesisir dan Merbau sendiri tidak mau berpartisipasi serta tidak terbuka untuk menerima penyuluhan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kepulauan. Kemudian bentuk inovasi yang dilakukan pihak BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti sangatlah kurang dikarenakan mereka lebih berfokus kepada inovasi rekonstruksi terhadap abrasi dibandingkan karhutla.

Dari penjabaran Indikator di atas peneliti menarik proposisi mayor bahwa Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan dan Rekonstruksi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk indikator Stabilisator, Inovator Modernisator, Pelopor dan Pelaksana sendiri akan berperan jika dijalankan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan direncanakan.

Dari penjabaran indikator di atas peneliti menarik proposisi minor bahwa Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan dan Rekonstruksi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk indikator stabilisator akan berperan jika mampu menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat Kampung Dalam. Dan indikator inovator akan berperan jika mampu memberikan inovasi lebih terhadap rekonstruksi dampak karhutla dan tidak berfokus kepada abrasi saja.

C. Faktor penghambat Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan dan Rekonstruksi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti maka peneliti dapat mengambil kesimpulan mengenai faktor yang menghambat Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan dan Rekonstruksi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan pernyataan Sekretaris BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti bapak Nurman, Kabid pencegahan dan Kesiapsiagaan bapak Roni Samudra, dan Camat Rangsang, Rangsang Pesisir dan Merbau yaitu Kurangnya partisipasi masyarakat Kecamatan tersebut untuk mau mengikuti sosialisasi/ penyuluhan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Berdasarkan pernyataan Sekretaris BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti bapak Nurman dan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi bapak Sudarmadi yaitu tidak adanya inovasi yang BPBD lakukan untuk penanggulangan dan Rekonstruksi dampak kebakaran hutan dan lahan. Terlebih untuk rekonstruksi pihak BPBD sendiri lebih terfokus kepada abrasi bukan terhadap kebakaran hutan dan lahan.
3. Berdasarkan pernyataan Subbag Umum dan Kepegawaian ibu Astina Yuliana dan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi bapak Sudarmadi yaitu kurangnya pengetahuan pegawai terhadap penanggulangan dan rekonstruksi yang dimiliki oleh pegawai. Terlebih masih kurangnya pegawai yang berpengalaman dan masih banyak nya pegawai honor yang belum memiliki pengetahuan khusus.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang dilakukan penulis, maka pada bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan dan Rekonstruksi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti, dan penulis juga memberikan saran sebagai acuan dari hasil penelitian yang sekiranya dapat berguna dan bermanfaat bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti agar bisa lebih baik kedepannya dalam penanggulangan dan rekonstruksi dampak kebakaran hutan dan lahan di kabupaten kepulauan meranti.

A. Kesimpulan

1. Stabilisator

Berdasarkan pelaksanaan sosialisasi/ penyuluhan dan koordinasi yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti melalui kbid pencegahan dan kesiapsiagaan, kbid rehabilitasi dan rekonstruksi, seharusnya bisa berperan sebagaimana mestinya untuk penanggulangan dan rekonstruksi dampak kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti namun pada kenyataannya BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti melalui kbid pencegahan dan kesiapsiagaan, kbid rehabilitasi dan rekonstruksi hingga saat ini masih kurang berperan terkhusus saat melakukan sosialisasi dan penyuluhan dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat di Kabupaten

Kepulauan Meranti setiap dilaksanakannya kegiatan penyuluhan. Walaupun demikian BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti berperan dan telah berusaha melakukan pendekatan yaitu berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Rangsang, Rangsang Pesisir dan Merbau.

2. Inovator

Untuk inovator, harapannya BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti kurang berperan dalam memberikan inovasi dalam penanggulangan dan rekonstruksi dampak kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti terkhusus untuk kapid pencegahan dan kesiapsiagaan serta kapid rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu dalam melakukan inovasi khusus terhadap rekonstruksi dampak daerah yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan dan pada kenyataannya BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti belum bisa dikatakan berperan dalam melakukan inovasi dalam menanggulangi dan rekonstruksi dampak kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sehingga dapat dikatakan juga inovasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti tidak berjalan efektif.

3. Modernisator

Untuk modernisator, BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti seharusnya berperan dalam memberikan pengetahuan kepada seluruh pegawai BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti agar memiliki penguasaan ilmu yang baik dalam melakukan penanggulangan dan rekonstruksi dampak kebakaran hutan dan lahan, dan pada kenyataannya BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti kurang berperan karena BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti kurang dalam

memberikan penguasaan ilmu pengetahuan dalam penanggulangan dan rekonstruksi dampak kebakaran hutan dan lahan, sehingga BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti kurang dalam menghasilkan SDM yang produktif.

4. Pelopor

Untuk pelopor, BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti berperan sebagai pelopor dalam menjadi panutan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat terhadap keproduktifan dalam bekerja dan memiliki kesadaran akan kepedulian terhadap lingkungan, dan pada kenyataannya BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti berusaha sigap dalam melayani masyarakat dan juga rutin melakukan gotong royong dan melakukan sosialisasi terhadap kepedulian lingkungan ke sekolah – sekolah.

5. Pelaksana Sendiri

BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai instansi pemerintah dalam melakukan kegiatan – kegiatannya dinilai berperan sebagai pelaksana sendiri, dengan segala bentuk usaha yang dilakukan BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti dapat bertanggung jawab, namun pada kenyataannya BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti juga konsisten dalam melayani masyarakat dengan visi agar terwujudnya ketangguhan dan kehandalan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam kerangka menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai kawasan yang maju dan unggul dalam tatanan masyarakat madani.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti memberikan saran sesuai analisis peneliti selama melakukan penelitian agar Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan dan Rekonstruksi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat berperan dengan baik jika:

1. BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti terkhusus kabid pencegahan dan kesiapsiagaan, kabid rehabilitasi dan rekonstruksi yang selama ini hanya beberapa kali melakukan sosialisasi/ penyuluhan penanggulangan dan rekonstruksi dampak karhutla untuk kedepannya harus lebih intens melakukan sosialisasi/ penyuluhan di Kecamatan – kecamatan yang terkena dampak kebakaran yang mana dengan seringnya dilakukan sosialisasi/ penyuluhan diharapkan mampu dengan optimal mengedukasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti pada umumnya untuk mengetahui dan menyadari akan penanggulangan dan rekonstruksi serta pentingnya menjaga lingkungan dari bahaya karhutla.
2. BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti harus mampu mencari jalan keluar seperti melakukan komunikasi dengan baik dan mampu menarik simpati masyarakat Kecamatan yang terkena dampak karhutla agar masyarakat mau untuk mengikuti dan berpartisipasi disetiap kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan dapat mencari jalan keluar seperti melakukan seminar dan hal-hal yang mampu memberikan

penguasaan ilmu yang jauh lebih baik agar BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki pegawai yang memiliki penguasaan ilmu yang baik di berbagai bidang dan menghasilkan SDM yang produktif dan handal sehingga mampu menunjang kinerja BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti jauh lebih baik.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

Literature

- Ali, Faried, 2014. Ilmu Administrasi, Makasar: PT Refika Aditama.
- Amirullah, Haris, 2004. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andry, Hendry. 2015. *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Hamim, Sufian, 2005. Administrasi, Organisasi, Manajemen. Pekanbaru: UIR Press.
- Hamim, Sufian, 2014. Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian. Pekanbaru: UIR Press.
- Indiahino, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gava Media
- Hasibuan, Melayu, 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaswan dan Akhyadi, Ade Sadikin, 2015. Pengembangan Sumberd Daya Manusia. Bandung: Alfabeta
- Korayati, Nyimas Dwi, dkk, 2005, *Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Wilayah*, Yogyakarta, YPAPI
- Ndraha, 2003. Kebijakan Publik. Jakarta: Alfabeta.
- Nugroho D, Riant, 2003. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta. PT.Elex Media Komputindo.
- Nugroho D, Riant, 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta. PT.Elex Media Komputindo.

- Nugroho D, Riant 2008. *Kebijakan Publik* (Formulasi, Implementasi dan evaluasi). Jakarta. PT. Elex Media Komputindo
- Nawawi, Ismail, 2007. *Public Policy Analisis Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya, CV. Pitra Media Nusantara
- Pasalong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Riva'i Veitzal, dan Mulyadi Deddy, 2009. *Kepemimpinan, dan Perilaku Organisasi*, Rajawali Press.
- Robbins, Stephen P, 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain, dan Aplikasi*. Jakarta, Arcan.
- Samsudin, 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Pustaka Setia.
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, teori dan aplikasi*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Siagian, P. Sondang. 2006. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P, 2007. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta, Bumi Aksara
- Silalahi, Ulbert, 2009. *Study Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung, Sinar Baru Aglesindo.
- Siswanto, H.B, 2013. *Pengantar Manajemen*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:

Alfabeta

Syafri, Wirman.2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Penerbit

Erlangga

Zulkifli, 2005. *Pengantar Study Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru,

UIR Press.

Winarno, Budi. 2012, *Kebijakan Publik*, Yogyakarta: GAPS.

Media/Dokumen

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Tugas
Pokok dan Fungsi BPBD Kepulauan Meranti

Situs Internet

wikipedia.com

<http://apik.merantikab.go.id/dokumen/PERBUP>

<http://MERDEKA.COM>